

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN DI KOTA SANANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Oleh :

**YUSRAN  
45 06 042 037**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2012**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN DI KOTA SANANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Skripsi

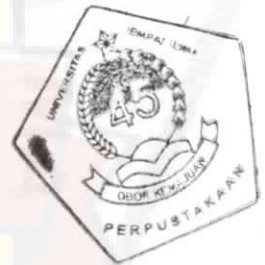
Sebagai Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana

Program Studi:

Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun oleh :

**YUSRAN**  
45 06 042 037



**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**FAKULTAS TEKNIK**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula**  
Nama Mahasiswa : **Yusran**  
StAmbuk : **45 06 042 037**  
Fakultas : **Teknik**  
Jurusan : **Perencanaan Wilayah dan Kota**

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Ir. Rudi Latief, M.Si

Pembimbing II

  
Nursyam Aksa, ST, M.Si

Pembimbing III

  
Jufriadi, ST, MSP

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Teknik  
Universitas "45" Makassar



  
Ir. Syafrī, MSi

Ketua Jurusan  
Perencanaan Wilayah & Kota  
Universitas "45" Makassar



  
S. Kamfan Aksa, ST., MT

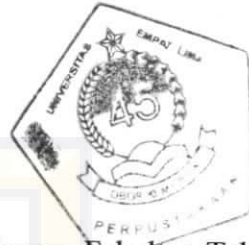
## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, Nomor : A.147/SK/FT.U-45/XI/2012 Tanggal 21 November 2012 tentang **PANITIA DAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**, maka :

Pada Hari/Tanggal : Kamis/06 Desember 2012

Skripsi atas nama : **Yusran**

Nomor pokok : **45 06 042 037**



Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana negara Jenjang Strata Satu (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas "45" Makassar.

### PENGAWAS UMUM

**Prof. DR. Abd Rahman,SH,MH**  
Rektor Universitas "45" Makassar

### TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Dr. Ir. Umar Mansyur, MT

Sekretaris : Jamaluddin Jahid, ST, M.Si

Anggota : 1. Ir. Syafri, M.Si

2. Ir. H. Nurdin Mone, M. Sp

3. Drs. H. Azis Mattola, M.Sp

4. Ir. Rudi Latief, M.Si

5. Nursyam Aksa, ST. M.Si

6. Jufriadi, ST, MSP

Disahkan :

Rektor

Universitas "45" Makassar

**Prof. DR. Abd Rahman,SH,MH**

Diketahui

Ketua jurusan

Teknik Perencanaan Wilayah & Kota

**S. Kamran Aksa, ST., MT**

## ABSTRAK

**YUSRAN.** *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula* (dibimbing oleh Ir. Rudi Latief, M.Si, Nursyam Aksa, ST. M.Si dan Jufriadi, ST, MSP)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan (2) untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan (3) untuk mengetahui sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat di Kota Sanana.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, kepustakaan, metode kuesioner, variabel dan indikator. Data analisis dengan menghitung nilai Chi-kuadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam faktor yaitu faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan/penghasilan dan lamanya tinggal terdapat pengaruh pada faktor usia, pekerjaan dan pendapatan/penghasilan terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil analisis Chi-kuadrat variabel yang berpengaruh yaitu variabel usia, pekerjaan, pendapatan/penghasilan memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan persampahan dari ketiga variabel tersebut adalah kurang erat. Sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat di Kota Sanana yaitu dibakar/ditimbun, dibuang kelahan kosong dan dibuang kelaut atau sungai.

Kata kunci: Partisipasi, Pengelolaan, Persampahan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula"***. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Saleh Teapon selaku orang tua dan Endang Teapon S. Kom, Yulsiah Teapon, Yuliawati Teapon selaku Kakak.
2. Dosen Pembimbing I **Ir. Rudi Latief, M.Si**, Pembimbing II **Nursyam Aksa, ST. M.Si** dan Pembimbing III **Jufriadi, ST. MSP**.
3. Pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, masyarakat, barokrasi Universitas "45", Fakultas Teknik dan Jurusan PWK.
4. Sahabat GP 06, Isa Sopalatu, Dewi Jayati dan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya harap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, Desember 2012

Penulis

**Yusran**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sampah .....	6
B. Pengertian Pengelolaan Sampah .....	7
C. Manajemen Pengelolaan Sampah.....	8
D. Sistem Pengelolaan Sampah.....	9
E. Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat .....	26
F. Bentuk Partisipasi.....	30
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
B. Metode Pengumpulan Data.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Teknik Analisis.....	44
F. Defenisi Operasional.....	47
G. Kerangka Pembahasan.....	49

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

A. Pembahasan.....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sula.....	50
a. Letak Geografis.....	50
b. Topografi.....	51
c. Kependudukan.....	52
2. Tinjauan Umum Kota Sanana.....	55
a. Kondisi Fisik Kota Sanana.....	55
1) Letak Geografis.....	55
2) Topografi.....	55
3) Geologi.....	59
4) Hidrologi.....	59
b. Kondisi Sosial Masyarakat.....	60
1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	60
2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61



3) Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	61
4) Sosial Ekonomi Masyarakat.....	63
5) Sosial Budaya Masyarakat .....	63
3. Arahan Kebijakan Pemerintah	
Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Persampahan .....	64
4. Sistem Pengelolaan Persampahan di	
Kabupaten Kepulauan Sula.....	65
a. Sumber Sampah .....	65
b. Daerah Pelayanan.....	66
c. Pola Operasi.....	66
d. Pewadahan .....	67
e. Pengumpulan.....	67
5. Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan	
Masyarakat Kota Sanana .....	72
6. Peranserta Pihak Swasta dalam Pengelolaan Persampahan	73
B. Analisis.....	74
1. Analisis Sosial Masyarakat Terhadap Tingkat	
Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah .....	74
a. Analisis Penduduk Berdasarkan Usia .....	74
b. Analisis Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	75
c. Analisis Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	76
d. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat .....	77
e. Analisis Sosial Lingkungan .....	80

2. Analisis Sistem Pengelolaan Persampahan di	
Kabupaten Kepulauan Sula.....	81
a. Sumber Sampah .....	81
b. Pola Operasional .....	83
c. Aspek Institusi .....	88
d. Aspek Pembiayaan.....	89
e. Aspek Peraturan .....	90
3. Analisis Sistem Pengelolaan Persampahan yang	
dilakukan Masyarakat Kota Sanana.....	92
4. Analisis Peranserta Pihak Swasta dalam	
Pengelolaan Persampahan .....	93
a. Peranserta Masyarakat .....	93
b. Kemitraan.....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Sampah dan Jenis Peralatan .....	15
Tabel 2.2. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi .....	34
Tabel 2.3. Tipe Partisipasi .....	35
Tabel 3.1. Variabel dan Indikator .....	41
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di Renci Per Kecamatan Tahun 2012 .....	51
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012 .....	52
Tabel 4.3. Topografi Kota Sanana di Rinci Per Desa Tahun 2012 .....	56
Tabel 4.4. Sumber Air yang dimanfaatkan Masyarakat Kota Sanana Tahun 2012 .....	59
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kota Sanana Berdasarkan Usia Tahun 2012 .....	60
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Sanana dirinci Per Desa Tahun 2012.....	61
Tabel 4.7. Fasilitas Pendidikan di Kota Sanana Tahun 2012 .....	62
Tabel 4.8. Mata Pencaharian dan Penghasilan Penduduk Kota Sanana Tahun 2012 .....	63
Tabel 4.9. Timbulan Sampah Kota Sanana Kepulauan Sula 2011 .....	66

Tabel 4.10. Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan	
Masyarakat Kota Sanana .....	72
Tabel 4.11. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Usia .	75
Tabel 4.12. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan	
Jenis Kelamin .....	76
Tabel 4.13. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan	
Pendidikan .....	77
Tabel 4.14. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan	
Pekerjaan .....	78
Tabel 4.15. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan	
Pendapatan/Penghasilan .....	79
Tabel 4.16. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan	
Lamanya Tinggal.....	80
Tabel 4.17. Rekapitulasi Chi-kuadrat.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pola Pengumpulan Individual Langsung .....	19
Gambar 2.2. Pola Pengumpulan Individual Tidak Langsung .....	20
Gambar 2.3. Pola Komunal Langsung .....	20
Gambar 2.4. Pola Komunal Tidak Langsung .....	21
Gambar 2.5. Skema Pengumpulan dengan Pola Komunal Langsung .....	22
Gambar 2.6. Skema Pengumpulan dengan Pola Komunal Tidak Langsung .....	23
Gambar Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Sula.....	53
Gambar Peta Topografi Kabupaten Kepulauan Sula .....	54
Gambar Peta Administrasi Kota Sanana .....	57
Gambar Peta Topografi Kota Sanana.....	58
Gambar Peta Rute Angkutan Sampah Kabupaten Kepulauan Sula .....	69
Gambar 4.1. Diagram Operasional Penanganan Sampah.....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumentasi.

Lampiran B. Kuesioner.

Lampiran C. Uji Chi-Kuadrat.

Lampiran D. Matriks Perbaikan.





# BAB I

## Pendahuluan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini sampah merupakan persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan optimal bahkan cenderung menjadi masalah yang tetaplah menjadi masalah setiap tahunnya. Penanganan dan pengolaan sampah masih lemah, salah satunya di karenakan kebijakan atau program pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat (baik dunia usaha maupun masyarakat umum).

Oleh para ahli dikatakan, jika timbulan sampah per orang per hari mencapai 3 liter, maka setiap hari dunia menerima 19,8 milyar liter sampah, suatu jumlah yang sangat besar. Terlebih bagi sampah yang terkumpul merupakan sampah dengan kategori sukar terurai oleh mikroorganisme. Menangani sampah memang bukanlah persoalan yang mudah, semakin meningkat jumlah penduduk dibarengi dengan semakin tingginya tingkat konsumsi tidak sebanding dengan ketersediaan TPA untuk menampungnya, sumber daya manusia yang menangani kebersihan, terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah yang masih konvensional, hingga sampai kepada masalah sosial yang ditimbulkan dari sampah (seperti, bau yang menyengat, air limbah sampah yang mencemari sungai, terganggunya kesehatan, serta rendahnya keaktifan masyarakat untuk mematuhi ketentuan pembuangan sampah). Pengelolaan dalam uu no. 18 tahun 2008 tentang



pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Sayadi, 2011:1-2).

Khusus di Kecamatan Sanana sebagai ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan Kota perdagangan, pelayanan jasa, dan pendidikan, pastilah sangat sulit untuk menanggulangi masalah sampah. Masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kota Sanana dalam upaya menjadi ibu Kota Kabupaten yang berkembang dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini.

Di Kota Sanana sistem pengelolaan sampah pada konteks peran serta masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih bersifat sementara yaitu pada saat ada kegiatan bakti lingkungan baru aktif mengikuti kegiatan tersebut setelah kegiatan itu selesai mereka kembali pada kegiatan semulanya. Cuman sebagian kecil masyarakat yang masih sadar akan kebersihan lingkungan, selain itu beranggapan bahwa penanganan masalah persampahan merupakan tugas dan peran pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi objektif lapangan, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Sanana dalam pengolahan sampah belum memberikan hasil yang memuaskan bagi lingkungan sekitarnya, sehingga kualitas dari sanitasi lingkungan mengalami degradasi nilai bagi lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sanana harus di lakukan pembinaan serta informasi tentang pengelolaan

sampah yang baik bagi masyarakat setempat. Langkah teknis yang harus dilakukan untuk melakukan penanggulangan sampah yang berserakan di Kota Sanana harus dilakukan sistem 3R di antaranya (reuse, reduce, recycle) adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan pola 3R adalah: membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei di Kota Sanana serta menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat dalam pengelolaan sampah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam uraian ini memberikan batasan pokok permasalahan:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan di Kota Sanana?
3. Bagaimana sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- b. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- c. Untuk mengetahui sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat di Kota Sanana.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Sanana.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat sebagai pelaksana dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan persampahan.
- c. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan persampahan di Kota Sanana.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam laporan ini, pembahasan dilakukan dengan sistematis untuk memudahkan dalam penganalisaan. Olehnya itu, sistematika pembahasannya sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Tinjauan Pustaka.** Bab ini menguraikan tentang pengertian sampah, pengertian pengelolaan sampah, manajemen pengelolaan sampah, sistem pengelolaan sampah, pengertian dan prinsip partisipasi, bentuk partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.
- BAB III Metodologi Penelitian.** Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis, definisi obrasional, dan kerangka pembahasan.
- BAB IV Pembahasan dan Analisis.** Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Kepulauan Sula, tinjauan umum Kota Sanana, arahan kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tentang persampahan, sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Sula, sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana, peranserta pihak swasta dalam pengelolaan persampahan, analisis sosial masyarakat terhadap tingkat partisipasi dalam pengelolaan sampah, analisis sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Sula, analisis sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana, analisis peranserta pihak swasta dalam pengelolaan persampahan.
- BAB V Penutup.** Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Sampah

Berdasarkan SK SNI tahun 2002 tentang teknik pengelolaan sampah perkotaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. SNI 19-2454-2002. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1986). Sampah kota secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar. (Sudradjat, 2009:5).

Dari pengertian diatas, sampah dapat diartikan sebagai sisa aktivitas manusia/masyarakat dan makhluk hidup maupun alam, tumbuh-tumbuhan yang bisa berdampak negatif dan berdampak positif tergantung jenis dan pengelolaannya.

## B. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah (UU-18/2008): Adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Catatan: pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan kesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (kementerian lingkungan hidup, 2007).

Menurut Departemen Pekerjaan Umum Kota Semarang (2008), pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (Reuse), mengurangi (Reduce), dan mendaur ulang (Recycle).

1. Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. Recycle (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Mengurangi sampah dari sumber timbunan, di perlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah ( dari hulu ) adalah menerapkan prinsip 3R

### **C. Manajemen Pengelolaan Sampah**

Dalam sistem manajemen pengelolaan sampah ada lima sub sistem yang saling terkait yaitu: kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat (Kodoatie dalam Alfiandra, 2009:30-31). Pada aspek kelembagaan, institusi pengelola persampahan dilakukan oleh instansi yang terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaannya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada aspek teknik operasional, dipilih suatu cara yang sesuai dengan kondisi persampahan yang ada. Biasanya di kota-kota besar menerapkan cara konvensional, yaitu membuang sampah mulai dari sumbernya kemudian dibuang langsung atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada aspek pembiayaan, dibutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk sistem pengelolaan persampahan agar dapat bergerak dengan lancar baik dengan bantuan dana dari luar maupun dengan pembiayaan sendiri. Pembiayaan dalam sistem pengelolaan persampahan diperlukan untuk pembiayaan pembangunan/ perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, upah tenaga operasional dan pemeliharaan.



## **D. Sistem Pengelolaan Sampah**

### **1. Pewadahan Sampah**

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Tujuan utama dari pewadahan adalah :

- Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika
- Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat.

Dalam operasi pengumpulan sampah, masalah pewadahan memegang peranan yang amat penting. Oleh sebab itu tempat sampah adalah menjadi tanggung jawab individu yang menghasilkan sampah (sumber sampah), sehingga tiap sumber sampah seyogyanya mempunyai wadah/tempat sampah sendiri. Tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk menampung sampah yang dihasilkannya agar tidak tercecer atau berserakan. Volumennya tergantung kepada jumlah sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap sumber sampah dan frekuensi serta pola pengumpulan yang dilakukan.

Untuk sampah komunal perlu diketahui/diperkirakan juga jumlah sumber sampah yang akan memanfaatkan wadah komunal secara bersama serta jumlah hari kerja instansi pengelola kebersihan perminggunya. Bila

hari kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, kapasitas penampungan komunal tersebut harus mampu menampung sampah yang dihasilkan pada hari minggu. Perhitungan kapasitasnya adalah jumlah sampah perminggu (7 hari) dibagi 6 (jumlah hari kerja perminggu).

#### **a. Permasalahan**

Kapasitas, bentuk dan jenis bahan, pola pengumpulan mempunyai kaitan yang sangat erat satu dengan lainnya. Wadah sampah yang tidak sesuai akan dapat menghambat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah khususnya waktu yang diperlukan dalam pembuangan sampah.

Pembuatan sampah dengan tenaga manusia memerlukan wadah sampah yang berbeda dari pembuatan secara mekanis.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 1988 ada suatu pasar yang baru dibangun dilengkapi dengan beberapa container besar kapasitas  $8 \text{ m}^3$  tetapi tidak disediakan kendaraan load, haul yang diperlukan (Arm Roll Truck). Akibatnya pasar tersebut bukan bersih indah, sebaliknya kotor dan bau karena sampah bertumpuk di luar dan dalam container yang sulit untuk dipindahkan/dimuatkan ke truck sampah. Di suatu kota lainnya ada yang membeli container metal  $1 \text{ m}^3$  seperti di Jakarta dalam jumlah yang banyak tetapi tidak mempunyai truck yang dilengkapi pemuat mekanis (lifter), sehingga menyulitkan operasi pengumpulan sampah.

Pada banyak lokasi perumahan-perumahan sering dijumpai kecenderungan pemilik rumah membuat bak-bak sampah permanen dari pasangan bata. Seperti diketahui, bahwa bak sampah permanen menghambat kecepatan operasi petugas pengumpul. Selain itu bak sampah permanen relatif lebih sulit dikontrol tingkat kebersihannya serta segi estetikanya juga kurang baik.

Agar tempat sampah ini dapat menunjang keberhasilan pengumpulan sampah, perlu didisain sedemikian sehingga cukup ringan dan memudahkan petugas kebersihan untuk mengambil/memindahkan sampahnya kedalam peralatan pengumpulan, cukup hygeniis dalam arti mengurangi kemungkinan kontak langsung antara sampah dengan petugas, tertutup untuk menghindari lalat serta bau, tahan lama, relatif cukup murah serta memperhatikan unsur estetika.

Wadah penyimpanan sampah tersebut ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memudahkan bagi para petugas untuk mengambilnya dengan cepat.

#### **b. Kriteria**

Pola penampungan bisa berbentuk :

- 1) Individual, setiap rumah/toko dan bangunan lainnya memiliki wadah sendiri, cocok untuk daerah pemukiman kelas menengah dan tinggi, pertokoan, perkantoran dan bangunan besar lainnya.
- 2) Komunal, tersedia 1 wadah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan cocok untuk daerah pemukiman kumuh dengan

tingkat ekonomi rendah, rumah susun, pemukiman padat sekali (yang menyulitkan proses operasi pengumpulan).

Sarana pewadahan diarahkan untuk memperhatikan hal - hal berikut :

- 1) Alat pewadahan yang disarankan untuk digunakan adalah tipe tidak tertanam (dapat diangkat) untuk memudahkan operasi pengumpulan.
- 2) Jenis wadah yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan pengadaannya dapat berupa :
  - Tong sampah ( plastik, fiberglass, kayu, logam, bambu).
  - Kantong plastik.
- 3) Ukuran wadah minimal dapat memadai timbulnya sampah selama 2 hari pada tiap tempat timbulan sampah ( untuk pemukiman 40 liter, sedangkan untuk komunal 100 liter - 1 m<sup>3</sup>).
- 4) Wadah mampu mengisolasi sampah dari lingkungan ( memiliki tutup )
- 5) Peruntukan wadah individual : toko, kantor, hotel, pemukiman high income , home industri.
  - Di halaman muka (tidak diluar pagar)
  - Mudah di ambil
  - Sumber sampah besar ( hotel, restoran ) boleh dibelakang dengan alasan estetika dan kesehatan, dengan syarat menjamin kemudahan pengambilan.
- 6) Peruntukan wadah komunal : pedagang kaki lima, rumah susun, pemukiman low income.
  - Tidak mengambil lahan trotoar ( harus ada lokasi khusus ).

- Tidak dipinggir jalan protokol.
- Sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
- Tidak mengganggu pemakai jalan.

### **c. Cara-Cara Pewadahan Sampah**

#### 1) Cara Pewadahan Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga hendaknya dimasukkan kedalam tempat sampah yang tertutup, apalagi untuk sampah dari sisa - sisa makanan karena akan cepat membusuk yang dapat menimbulkan bau dan mengundang lalat serta menjadi media perkembangan.

- Tempat sampah pada pola pengumpulan individual

Pewadahan pada pola pengumpulan individual (langsung / tidak langsung), kapasitas wadah minimal dapat menampung sampah untuk 3 hari (+ 40 - 60 liter), hal ini berkaitan dengan waktu pembusukan dan perkembangan lalat, masih cukup ringan untuk diangkat oleh orang dewasa sendirian (dirumah atau petugas kebersihan) serta efisiensi pengumpulan (pengumpulan dilakukan 2-3 hari sekali secara reguler). Bila tempat sampah menggunakan kantong plastik bekas, ukuran dapat bervariasi, kecuali dibuat standar.

Pada pemakaian bak sampah permanen dari pasangan bata atau lainnya (tidak dilanjutkan), sampah diharuskan dimasukkan dalam kantong plastik sehingga memudahkan serta mempercepat proses pengumpulan.

- Tempat sampah pada pola pengumpulan komunal

Kapasitas disesuaikan dengan kemudahan untuk membawa sampah tersebut (oleh penghasil sampah) ke tempat penampungan komunal (container besar, bak sampah, TPS). Kapasitas tersebut untuk menampung sampah maksimum 3 hari (cukup berat untuk membawanya sampai ke penampungan komunal yang jaraknya kira-kira 50 - 100 m dari rumah).

## 2) Cara Pewadahan Sampah Non Rumah Tangga

Prinsip kesehatan tetap dipertahankan (tertutup dll), sedangkan kapasitasnya tergantung aktifitas sumber sampah serta jenis/komposisi sampahnya. Perkantoran misalnya, sampah umumnya didominasi oleh kertas yang tidak mudah membusuk dan tidak berbau busuk.

Kapasitas penyimpanan sampah dari perkantoran dapat diperhitungkan untuk menampung sampah sampai 1 minggu. Untuk jumlah sampahnya besar, pemakaian bin atau container besar dapat dipertimbangkan dan harus memperhatikan peralatan pengumpulan yang digunakan.

Bila jumlah sampahnya dapat mencapai 6- 10 m<sup>3</sup> perhari atau setelah 1 minggu, pemakaian container dari Arm roll truck dianjurkan.

Sampah dari pasar setiap harinya berjumlah besar dan cepat membusuk, oleh karena itu pemakaian tempat sampah komunal dari container arm roll dianjurkan, sedangkan masing - masing toko atau kios dapat menggunakan kantong plastik, bin plastik atau keranjang

dengan kapasitas 50-120 liter tergantung jumlah sampah yang diproduksi setiap harinya.

### 3) Cara Pewadahan Sampah Bagi Pejalan Kaki

Disepanjang daerah pertokoan atau taman dan tempat - tempat umum dapat dilakukan dengan menempatkan bin-bin sampah plastik. Sampah dari pejalan kaki ini umumnya terdiri dari pembungkus makanan atau lainnya yang tidak cepat membusuk. Kapasitas tempat sampah ini berkisar 50 - 120 liter.

#### d. Jenis Peralatan dan Sumber Sampah

Tabel 2.1. Sumber Sampah dan Jenis Peralatan

Sumber Sampah	Jenis Peralatan
Daerah perumahan yang sudah teratur/belum teratur	- Kantong plastik/kertas volume sesuai yang ada
Pasar	- Bin plastik/tong volume 40-60 lt dengan tutup
	- Bin/tong sampah, volume 50-60 lt yang dipasang secara permanen
	- Bin/plastik, volume 120-240 lt ada tutupnya dan memakai roda
	- Gerobak sampah, volume 1 m <sup>3</sup>
	- Container dari Arm roll kapasitas 6-10 m <sup>3</sup>
Pertokoan	- Bak sampah isi variabel
	- Kantong plastik, volume bervariasi
	- Bin plastik/tong, volume 50-60 lt
Perkantoran/hotel	- Bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda
	- Container volume 1 m <sup>3</sup> beroda
Tempat umum, jalan dan taman	- Container besar volume 6-10 m <sup>3</sup>
	- Bin plastik/tong volume 50-60 lt, yang dipasang secara permanen
	- Bin plastik, volume 120-240 dengan roda

### e. Perhitungan Kapasitas dan Jumlah Pewadahan Sampah

Penetapan kapasitas (ukuran/volume) pewadahan sampah biasanya ditentukan berdasarkan :

- 1) Jumlah penghuni dalam suatu rumah
- 2) *Tingkat hidup masyarakat*
- 3) Frekuensi pengambilan/pengumpulan sampah
- 4) Cara pengumpulan (manual atau mekanis)
- 5) Sistem pelayanan, individual atau komunal

Contoh perhitungan tempat penyimpanan sampah

Dibawah ini diberikan beberapa contoh perhitungan kebutuhan peralatan untuk penduduk kota dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa dan tingkat pelayanannya 60 %.

Laju timbulan sampah 3 lt/orang/hari, tiap rumah tangga mempunyai anggota keluarga 6 jiwa, frekuensi pelayanan 2 hari sekali (3 kali perminggu)

Jumlah penduduk kota 150.000 jiwa, dengan tingkat pelayanan 60 %.

Jadi jumlah penduduk yang akan dilayani =  $60 \times 150.000$  jiwa = 90.000 jiwa.

Setiap rumah tangga mempunyai anggota keluarga 6 jiwa, maka

kebutuhan tong sampah untuk rumah tangga =  $\frac{90.000}{6} = 15.000$  buah

Tempat sampah ini harus disediakan sendiri, namun untuk mempercepat



proses pengosongan oleh petugas maupun untuk kesehatan petugas, waktu proses pengumpulan sampah serta keindahan, tempat sampah tersebut dapat distandarisasi.

Frekuensi pelayanan diberikan setiap 2 hari sekali dan setiap orang menghasilkan 3 liter sampah perhari, maka dalam 2 hari setiap rumah tangga menghasilkan sampah sebanyak =  $2 \times 6 \times 3$  liter = 36 liter.

Volume tong sampah dibulatkan = 40 liter. Bila frekuensi pelayanan 3 hari sekali, volume tong sampah =  $3 \times 6 \times 3$  liter = 54 liter, dibulatkan 60 liter.

## **2. Pengumpulan Sampah**

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara/stasiun pamindahan atau sakaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (sumber sampah, badan swasta atau RT/RW).

Pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah banyak ditentukan oleh tingkat kemampuan pihak kota dalam memikul beban masalah persampahan kotanya.

Dalam teknis operasional pengelolaan sampah biaya untuk kegiatan pengumpulan sampah dapat mencapai 40 % dari total biaya operasional.

Karenanya perlu diupayakan suatu teknik pengumpulan yang efektif dan

efisien, termasuk pertimbangan terhadap tempat penyimpanan sampah, agar biaya operasi dapat ditekan serendah mungkin.

#### **a. Permasalahan**

Salah satu permasalahan di dalam aspek teknis operasional yang umumnya masih dijumpai adalah terbatasnya jumlah peralatan persampahan (termasuk didalamnya peralatan pengumpulan), pemeliharaan yang belum terencana dengan baik serta belum adanya metode operasi yang sesuai.

Pada hampir seluruh kota-kota besar dan sedang di Indonesia, dijumpai sisa-sisa sampah tidak terangkut yang disebabkan oleh belum efisiensinya cara-cara pengumpulan sampah yang diterapkan. Hal ini lebih jauh akan membawa dampak negative terhadap kesehatan masyarakat.

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang padat karya dan proses yang paling mahal dibandingkan dengan proses-proses lain di dalam pengelolaan sampah. Pada kenyataannya biaya untuk pengumpulan terus meningkat dari waktu ke waktu dengan munculnya daerah-daerah kumuh yang harus dilayani sebagai akibat dari proses urbanisasi.

Secara lebih mendetail permasalahan-permasalahan yang umumnya dijumpai pada sistem pengumpulan ini adalah :

- 1) Penggunaan waktu kerja yang tidak efisien karena keterlambatan mulai bekerja, lamanya waktu memuat dan membongkar, hilangnya waktu dan lain-lain.

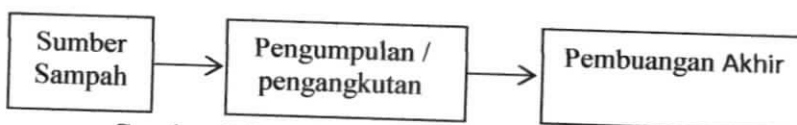
- 2) Penggunaan kapasitas muat yang tidak tepat, misalnya terlalu penuh pada rit 1 dan kosong pada rit berikutnya. Muatan yang terlalu penuh membuat kendaraan cepat rusak.
- 3) Jenis pewadahan yang tidak tepat, tidak seragam dan standar sehingga memperlambat proses pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul.
- 4) Rute pelayanan yang belum optimum, sehingga tidak diperoleh penghematan waktu untuk operasi pengumpulan.
- 5) Tingkah laku petugas dan kerja sama masyarakat yang kurang baik, seperti misalnya kerjasama antara petugas dan masyarakat serta efisiensi kerja petugas kurang baik.
- 6) Aksebilitas yang kurang baik, seperti misalnya jalan-jalan yang terlalu sempit, kondisi jalan yang rusak, kemacetan dan lain-lain.

### c. Operasi Pengumpulan Sampah

Pada dasarnya pengumpulan sampah dapat dikelompokkan dalam 2 pola pengumpulan :

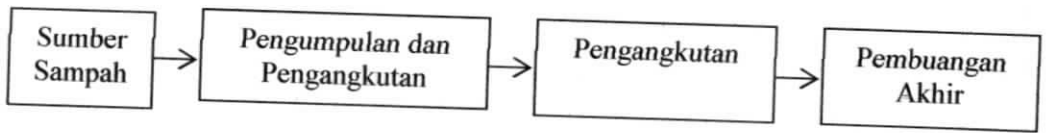
#### 1) Pola Individual Langsung

Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap bangunan/sumber sampah (door to door) dan langsung diangkut untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir. Pola pengumpulan ini menggunakan kendaraan truck sampah biasa, dump truck atau compactor truck.



Gambar 2.1. pola pengumpulan individual langsung

## 2) Pola Individual tidak Langsung



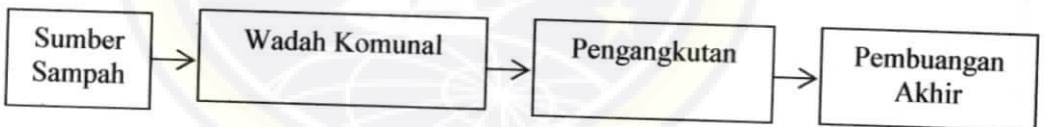
Gambar 2.2. pola pengumpulan individual tidak langsung

Daerah yang dilayani kedua cara tersebut diatas umumnya adalah lingkungan pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman.

Transfer Depo tipe I, tipe II atau tipe III, tergantung luas daerah yang dilayani dan tersedianya tanah lokasi,

## 3) Pola Komunal Langsung

Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan (semacam jali-jali di jakarta)



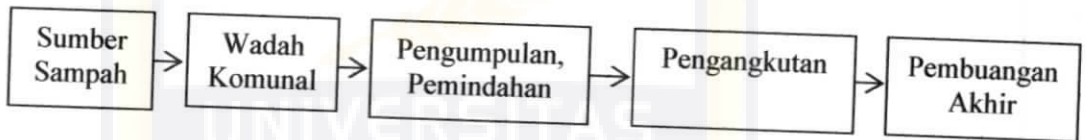
Gambar 2.3. pola komunal langsung

## 4) Pola Komunal tidak Langsung

Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga dll) ke tempat-tempat yang telah disediakan/ditentukan (bin/tong sampah komunal) atau langsung ke gerobak/becak sampah yang mangkal pada titik-titik pengumpulan komunal.

Petugas kebersihan dengan gerobaknya kemudian mengambil sampah dari tempat - tempat pengumpulan komunal tersebut dan dibawa ke tempat penampungan sementara atau transfer depo sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir dengan truck sampah.

Bila tempat pengumpulan sampah tersebut berupa gerobak yang mangkal, petugas tinggal membawanya ke tempat penampungan sementara atau transfer depountuk dipindahkan sampahnya ke atas truck.



Gambar 2.4. pola komunal tidak langsung

### 3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan, dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan (Trasfer Depo, Trasfer Station), penampungan sementara (TPS, TPSS, LPS) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

#### a. Pengangkutan Berdasarkan Pola Pengumpulan Sampah

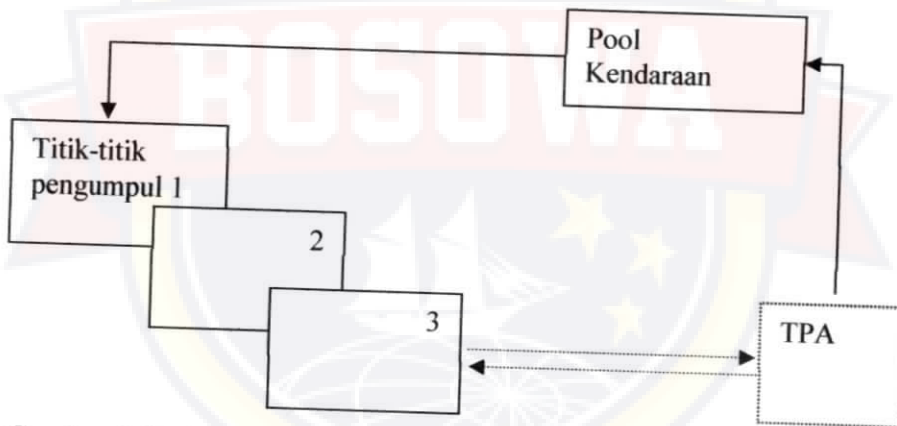
- 1) Pengangkutan pada Pengumpulan dengan Pola Individual Langsung.

Pengangkutan sampah untuk pengumpulan yang digunakan pola

Individual Langsung, kendaraan yang digunakan untuk pengumpulan juga langsung digunakan untuk pengangkutan ke TPA.

Dari pool, kendaraan langsung menuju ke titik - titik pengumpulan (sumber sampah) dan setelah penuh dari titik pengumpulan terakhir (dalam suatu rit atau trip).

Setelah menurunkan sampah di TPA, kemudian kembali ke titik pengumpulan pertama untuk rit atau trip berikutnya, setelah penuh dari titik pengumpulan terakhir pada rit tersebut langsung menuju ke TPA demikian seterusnya dan akhirnya dari TPA langsung kembali ke pool.



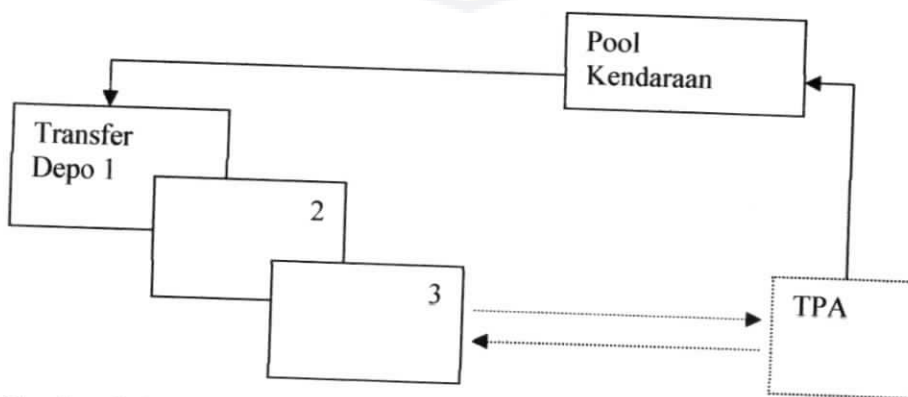
Gambar 2.5. skema pengumpulan dengan pola komunal langsung

## 2) Pengangkutan pada pengumpulan dengan Pola Individual tidak Langsung

Pengangkutan dari Transfer Depo tipe I dan tipe II, untuk pengumpulan sampah dengan pola individuai tidak langsung (menggunakan gerobak/becak sampah dan transfer depo tipe I atau II), angkutan sampahnya sebagai berikut:

- Kendaraan angkutan keluar dari pool langsung menuju lokasi TD dan sampah-sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan akhir.
- Dari TPA, kendaraan tersebut kembali ke TD untuk pengambilan/pengangkutan pada rit atau trip berikutnya. Path rit terakhir sesuai dengan yang ditentukan, (jumlah sampah yang harus diangkut habis) kendaraan tersebut langsung kembali ke pool.
- Dapat terjadi setelah sampah di salah satu TD habis mengambil sampah dari TD lain atau dari TPS/TPSS /LPS.
- Selain itu dapat diatur pula pengangkutannya bergantian dengan TD lain sehingga tidak ada waktu idle dari Dump Truck.

Hal ini dimungkinkan bila jarak TPA dekat ke TD sehingga waktu tempuh truck cukup singkat, sehingga bila langsung dari TPA menuju TD yang sama, kemungkinan akan mengganggu menunggu gerobak yang sedang melakukan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah (door to door). Dengan memperhitungkan waktu secara cukup cermat (waktu tempuh gerobak 1 trip dan waktu tempuh truk 1 trip). dapat disusun jadwal pengangkutan pada tiap TD.



Gambar 2.6. skema pengumpulan dengan pola komunal tidak langsung

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang,



atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif* yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, (2004) adalah:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>

## **F. Bentuk Partisipasi**

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan operasional program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran, dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41). Sementara Parfi dalam Alfiandra (2009:38-39) Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari partisipasi masyarakat untuk menghasilkan ide dan persepsi yang berguna untuk masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Canter dalam Santoso, 1990:4). Sebab dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak suatu kegiatan dari cara pengambilan keputusan, kebutuhan dari pengharapan kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat itu

menuangkannya kedalam suatu konsep. Reaksi dari pandangan masyarakat itu akan membantu masyarakat itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas, arah dan kepentingan yang positif dari berbagai faktor.

Partisipasi haruslah terbuka untuk umum, partisipasi akan mempengaruhi kredibilitas suatu badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang ada akhinya akan memaksa tanggung jawab dari badan negara atas kegiatan yang dilakukan. Ada tiga hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Keadaan sosial masyarakat
2. Kegiatan program pembangunan
3. Keadaan alam sekitar.

Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan, dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan keadaan alam sekitar mencakup faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta

benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun

program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja dan atau perkakas.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan dan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk

	mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tipe Partisipasi

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/manipulatif	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi

		hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5.	Partisipasi fungsional	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7.	Self mobilization	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya.



Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

### **G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

#### **1. Usia**

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### **2. Jenis Kelamin**

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah

mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

### 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

### 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

### 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggalan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>



# **BAB III**

## **Metodologi Penelitian**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup dalam penelitian ini di titik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan bagaimana sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Sanana yaitu:

- Metode Observasi

Observasi (melakukan pengamatan lapangan), terhadap kondisi persampahan dan partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.

- Kepustakaan

Studi literatur dimaksudkan untuk memperoleh dasar teori yang mendukung proses analisis. Literatur-literatur yang digunakan antara lain literatur-literatur yang memuat teori tentang pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat yang diperoleh melalui Jurnal PWK, badan pemerintah, internet, serta literatur pendukung lainnya yang terkait dengan bahan penelitian.

- Metode Kuesioner

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membuat daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi sendiri oleh responden secara tertulis pula.

- Variabel dan Indikator Penelitian

Untuk memperoleh informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Sanana secara relevan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Jenis variabel dan indikator yang di pakai dalam penelitian ini sabagaimana pada tabel 3.1:

Tabel 3.1  
Variabel dan Indikator

	Variabel	Indikator
1.	Usia	Lansia 55-64 Tahun Keatas
		Dewasa 18-54 Tahun
		Remaja 12-17 Tahun
		Anak-anak 9-11 Tahun
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
		Perempuan
3.	Tingkat Pendidikan	Perguruan Tinggi
		SMU atau sederajat
		SLTP atau sederajat
		SD atau sederajat
4.	Pekerjaan	Wiraswasta
		PNS, TNI, POLRI
		Petani
		Pengangguran
5.	Pendapatan/Penghasilan	Rp 2.000.000/Bln
		Rp 1.500.000/Bln
		Rp 1.000.000/Bln
6.	Lamanya Tingal	Tidak tetap
		Selamanya
		10-15 tahun
		5-10 tahun
		Dibawah 5 tahun

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Kuantitatif

Adalah jenis data numerik atau berupa angka yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematik.

#### b. Data Kualitatif

Data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis tetapi dengan kata-kata atau narasi atau untuk menjelaskan tentang peran atau partisipasi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam proses pengelolaan persampahan.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan pada lokasi penelitian yang menyangkut prosedur kerja dan bahkan pencatatan data dengan melihat langsung keadaan sebenarnya, menyangkut hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun data yang maksud:

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat
- Sketsa atau gambaran tentang lokasi penelitian



- Sebaran angket (kuesioner), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membuat daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi sendiri oleh responden secara tertulis pula.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti pemerintah maupun swasta. Adapun data yang di maksud:

- Data fisik yang mencakup letak geografis.
- Data sosial mencakup kependudukan.
- Peta-peta yang terkait dengan penelitian ini.
- Data persampahan.

#### **D. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang bermukim di Kota Sanana dengan jumlah 4808 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, yang diharapkan keberadaannya dapat mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan populasi yang sebenarnya. Sampel yang ditarik menggunakan metode sample random sampling. Sampel diambil secara acak sederhana (sample random sampling). (Sudjana, 1992:165)

Untuk efisiensi penelitian maka sampel ditetapkan secara proporsional dengan menggunakan rumus matematis yaitu:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel yang diambil

N= Jumlah KK daerah penelitian (4808 jiwa)

d = Derajat yang ditetapkan (0,1)

$$n = \frac{4808}{4808(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{4808}{49,08}$$

$$n = 97,962 \quad n = 98 \text{ sampel/responden}$$

#### E. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dilakukan secara deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek/objek penelitian.
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif yaitu dilakukan secara deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek/objek penelitian dan Analisis Deskriptif Kuantitatif yaitu analisis Chi-Kuadrat.

- Untuk Menghitung Frekuensi Harapan dengan menggunakan rumus:

$$f_h = \frac{(n_{io} - n_{oj})}{n}$$

$f_h$  = Frekuensi yang Harapan

$n_{io}$  = Jumlah Baris

$n_{ij}$  = Jumlah Kolom

$n$  = Jumlah Sampel

- Untuk menghitung nilai Chi-Kuadrat dengan menggunakan rumus :

$$X^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Dimana :

$X^2$  = Chi-Kuadrat

$f_o$  = Frekuensi Observasi

$f_h$  = Frekuensi Harapan

- Untuk menghitung derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan Koefisien Kontingensi dengan menggunakan rumus:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(n + X^2)}}$$

Dimana :

$C$  = Koefisien Kontingensi

$X^2$  = Hasil Perhitungan Uji Chi-Kuadrat

$n$  = Jumlah Responden

- Agar nilai  $C$  dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi kedua variabel, maka nilai  $C$  perlu dibandingkan dengan Koefesien Kontingensi maksimumnya dengan menggunakan rumus:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Dimana :

$C_{maks}$  = Koefesien Kontingensi

$m$  = Nilai minim antara baris dan kolom

- Dengan membandingkan  $C$  dengan  $C_{maks}$  maka keeratan hubungan kedua variabel ditentukan oleh persentasenya dengan menggunakan rumus:

$$Q = \frac{C}{C_{maks}} \times 100\%$$

Dimana :

$Q$  = Untuk menyatakan persentase derajat hubungan antara kedua variabel.

$C$  = Koefesien Kontingensi

$C_{maks}$  = Koefesien Kontingensi maksimum

Dengan ketentuan-ketentuan Davis (1971) sebagai berikut:

1. Sangat erat jika  $Q \geq 0,70$
2. Erat jika  $Q$  antara 0,50 dan 0,69
3. Cukup erat jika  $Q$  antara 0,30 dan 0,49
4. Kurang erat jika  $Q$  antara 0,10 dan 0,29
5. Dapat diabaikan jika  $Q$  antara 0,01 dan 0,09
6. Tidak ada jika  $Q = 0,00$

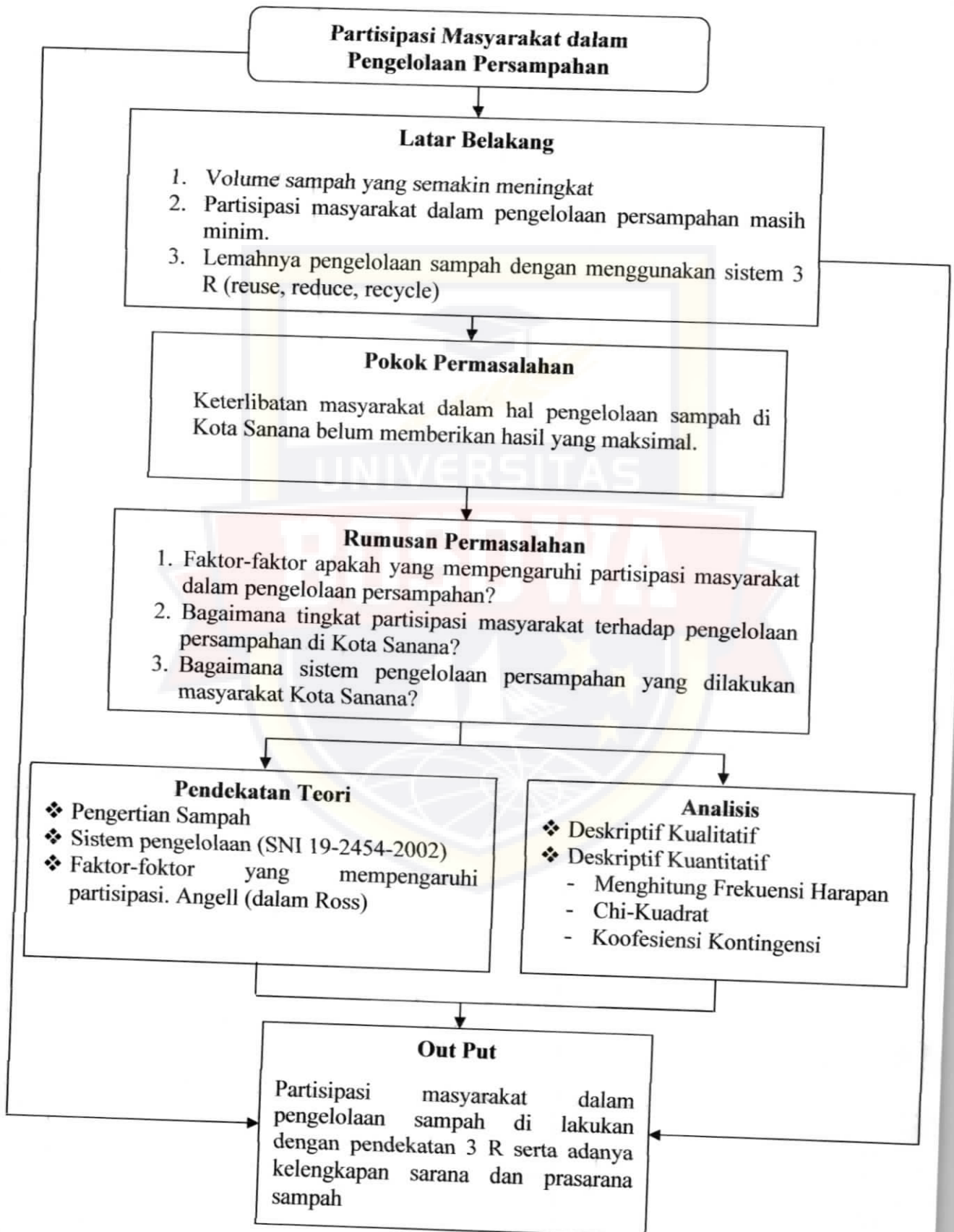
## F. Defenisi Operasional

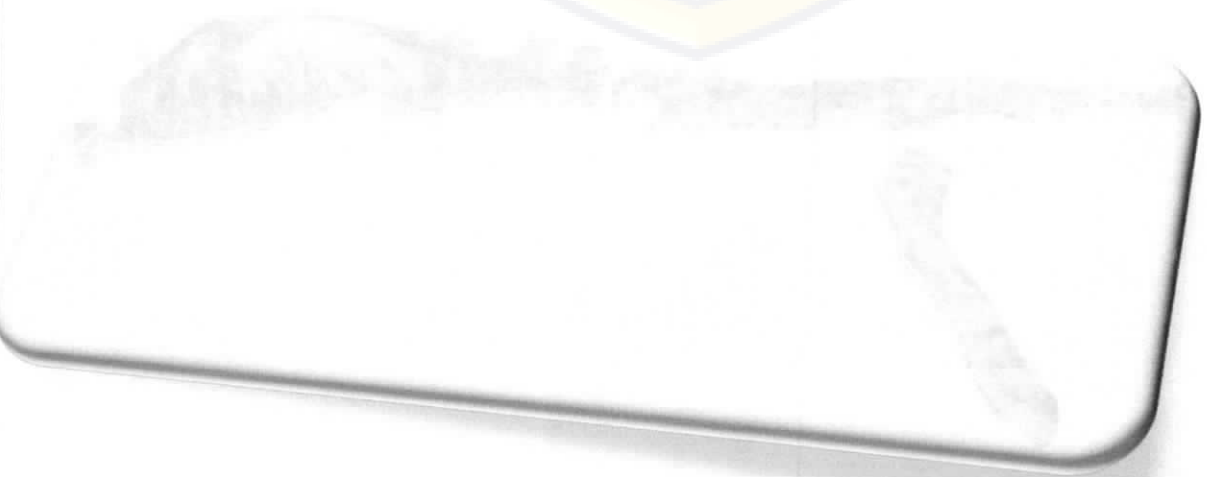
Defenisi operasional digunakan berdasarkan atas beberapa istilah penulisan yang di jadikan indikator pada laporan ini dengan maksud untuk menyatukan persepsi dan kelancaran pihak pembaca dalam hal pengelolaan persampahan, antara lain sebagai berikut.

1. **Usia** adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengolahan persampahan yang diukur berdasarkan usia atau umur orang tersebut yang terbagi atas:
  - a. Lansia: 55-64 tahun keatas;
  - b. Dewasa: 19-54 tahun;
  - c. Remaja: 12-18 tahun;
  - d. Anak-anak: 9-11 tahun.
2. **Jenis Kelamin** adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengolahan persampahan yang diukur berdasarkan jenis kelamin orang tersebut.
3. **Pendidikan** tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengolahan persampahan yang diukur berdasarkan tingkat strata pendidikan yang dijenjanginya, antara lain:
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. SMU dan sestratanya;
  - c. SLTP dan sestratanya;
  - d. SD dan sestratanya.

4. **Pekerjaan** adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengolahan persampahan yang diukur berdasarkan jenis pekerjaan orang tersebut yang terbagi atas:
- Wiraswasta;
  - PNS/TNI/POLRI;
  - Petani;
  - Pengangguran.
5. **Pendapatan/Penghasilan** adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengelolaan persampahan yang diukur berdasarkan pendapatan/penghasilan orang tersebut dihitung perbulan, antara lain:
- Rp 2.000.000/Bln
  - Rp 1.500.000/Bln
  - Rp 1.000.000/Bln
  - Tidak tetap
6. **Lamanya Tinggal** adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan pengolahan persampahan yang diukur berdasarkan lamanya tinggal di lingkungan tersebut, antara lain:
- Selamanya;
  - 10-15 Tahun;
  - 5-10 Tahun;
  - Dibawah 5 tahun.

## G. Kerangka Pembahasan







## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Pembahasan

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sula

###### a. Letak Geografis

Kabupaten Kepulauan Sula diresmikan sebagai daerah otonom Baru pada tanggal 31 Mei 2003. Berdasarkan hasil pengukuran ulang luas wilayah tahun 2006, luas total wilayahnya 28.810,75 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas daratan seluas 14.466,29 Km<sup>2</sup> (50,21%) dan lautan seluas 14.344,46 Km<sup>2</sup> (49,79%). Struktur wilayah Kepulauan Sula terdiri atas 3 (tiga) pulau besar yaitu Pulau Sulabesi, Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas 19 Kecamatan dan 135 Desa serta dikelilingi oleh Pulau-Pulau kecil yang berjumlah +58 pulau dengan panjang garis pantai 169,85 kilometer.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Sula terletak pada posisi 01° 31' 00''-02° 33' 00'' LS dan 124° 05' 00''- 126° 50' 00'' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Seram.

Tabel 4.1  
Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di Renci Per Kecamatan  
Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Luas Lautan (Km2)	Luas	Persentase (%)
1	Sanana	222,24	270,88	493,12	1,71
2	Sanana Utara	269,43	629,35	898,78	3,12
3	Sulabesi Tengah	238,55	341,17	579,72	1,71
4	Sulabesi Timur	213,72	115,28	329	1,14
5	Sulabesi Barat	246,46	699,76	946,22	3,28
6	Sulabesi Selatan	285,76	777,89	1063,65	3,69
7	Mangoli Timur	899,65	804,69	1704,34	5,92
8	Mangoli Utara Timur	765,23	913,25	1678,48	5,83
9	Mangoli Tengah	1.207,63	487,21	1.694,84	5,88
10	Mangoli Barat	1.013,71	353,14	1.366,85	4,74
11	Mangoli Selatan	1.017,05	487,21	1.504,26	5,22
12	Mangoli Utara	706,11	767,35	1473,46	5,11
13	Taliabu Timur	1.151,15	1.275,07	2.426,22	8,42
14	Taliabu Timur Selatan	882,04	1.336,49	2.218,53	7,70
15	Taliabu Barat	1.557,53	1.553,61	3.111,14	10,80
16	Taliabu Utara	1.645,92	1.410,79	3.056,71	10,61
17	Taliabu Barat Laut	498,73	451,51	950,24	3,30
18	Lede	637,36	687,97	1325,33	4,60
19	Taliabu Selatan	1.008,03	981,86	1.989,89	6,91
<b>Kepulauan Sula</b>		<b>14.466,29</b>	<b>14.344,46</b>	<b>28.810,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012

#### b. Topografi

Berdasarkan topografi sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Sula berada pada daerah pesisir. Berdasarkan kelas ketinggian, pada umumnya wilayah Kepulauan Sula berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan air laut dan kondisi hutan masih utuh ekosistemnya dengan hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

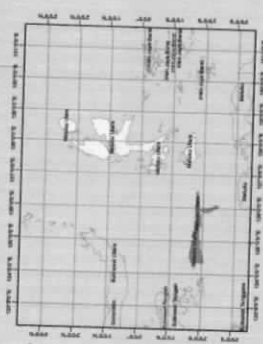
### c. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 132.524 jiwa yang tersebar di 19 Kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100. Kecamatan Sanana dengan jumlah penduduk terbesar sementara Kecamatan Sulabesi Timur merupakan Kecamatan dengan Jumlah Penduduk terkecil. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sanana	12.666	12.517	25.183
2	Sanana Utara	2.959	2.716	5.675
3	Sulabesi Tengah	2.947	2.982	5.929
4	Sulabesi Timur	1.579	1.521	3.100
5	Sulabesi Barat	2.406	2.301	4.707
6	Sulabesi Selatan	2.122	2.176	4.298
7	Mangoli Timur	2.171	2.130	4.301
8	Mangoli Utara Timur	1.912	1.865	3.777
9	Mangoli Tengah	3.285	3.096	6.381
10	Mangoli Barat	3.577	3.507	7.084
11	Mangoli Selatan	2.392	2.273	4.665
12	Mangoli Utara	5.205	4.910	10.115
13	Taliabu Timur Selatan	2.673	2.393	5.066
14	Taliabu Timur	1.861	1.681	3.542
15	Taliabu Barat	4.616	4.411	9.027
16	Taliabu Utara	5.610	5.270	10.880
17	Lede	2.994	2.983	5.977
18	Taliabu Barat Laut	2.028	2.051	4.079
19	Taliabu Selatan	4.453	4.285	8.738
<b>Kepulauan Sula</b>		<b>67.456</b>	<b>65.068</b>	<b>132.524</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012



LAUT SERAM

LAUT BANDA



# Kabupaten Kepulauan Sula

**Judul Skripsi:**  
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kab. Kepulauan Sula

**Gambar:**  
Peta Administrasi

**Keterangan:**

Garis Pantai	Mangoli Utara Timur	Taliabu Barat Laut
bataskecamatan	Sanana	Taliabu Selatan
Lede	Sanana Utara	Taliabu Timur
Mangoli Barat	Sulabesi Barat	Taliabu Timur Selatan
Mangoli Selatan	Sulabesi Selatan	Taliabu Utara
Mangoli Tengah	Sulabesi Tengah	
Mangoli Timur	Sulabesi Timur	
Mangoli Utara	Taliabu Barat	


**Pembimbing:**  
1. Ir. Rudi Latief, M.Si  
2. Nursyam Aksa, ST, M.Si  
3. Jufriadi, ST, MSP

**Mahasiswa:**  
Yusran  
45 06 042 037

**Skala 1:1.000.000**

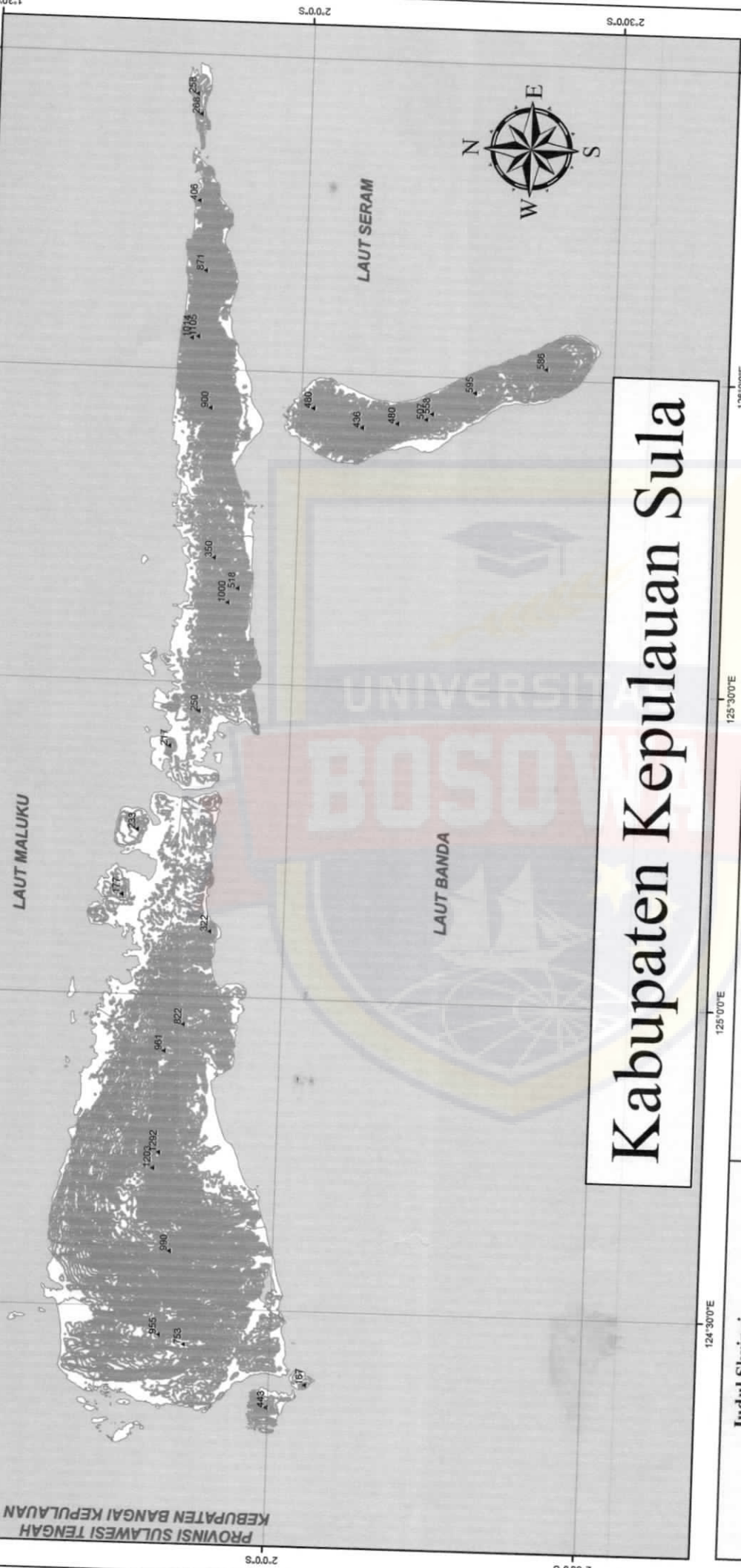
**Sumber:**  
- BAPPEDA Kab. Kep. Sula 2012  
- Survey Lapangan 2012

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar 2012




124°30'0"E      125°00'0"E      125°30'0"E      126°00'0"E

2°00'0"S      2°30'0"S      2°00'0"S      2°30'0"S



# Kabupaten Kepulauan Sula

<p><b>Judul Skripsi:</b> Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kab. Kepulauan Sula</p>	<p><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik Ketinggian Kab</li> <li>— Garis Kontur Interval 50</li> <li>□ Garis Pantai</li> <li>□ Kab. Kep. Sula</li> </ul>	<p><b>Pembimbing:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Rudi Latief, M.Si</li> <li>2. Nursyam Aksa, ST, M.Si</li> <li>3. Jufrjadi, ST, MSP</li> </ol>	<p><b>Skala 1:1.000.000</b></p> <p><b>Sumber:</b> - BAPPEDA Kab. Kep. Sula 2012 - Survey Lapangan 2012</p>
<p><b>Gambar:</b> Peta Topografi</p>		<p><b>Mahasiswa:</b> Yusran 45 06 042 037</p>	 <p>Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar 2012</p>

## **2. Tinjauan Umum Kota Sanana**

### **a. Kondisi Fisik Kota Sanana**

#### **1) Letak Geografis**

Sanana adalah Ibu Kota dari Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara. Kota ini adalah hasil pemekaran wilayah yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Sanana merupakan salah satu dari Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah ada sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula, berbeda dengan Kecamatan–Kecamatan lainnya. Batas wilayah Kota Sanana sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Sanana Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Sulabesi Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram

#### **2) Topografi**

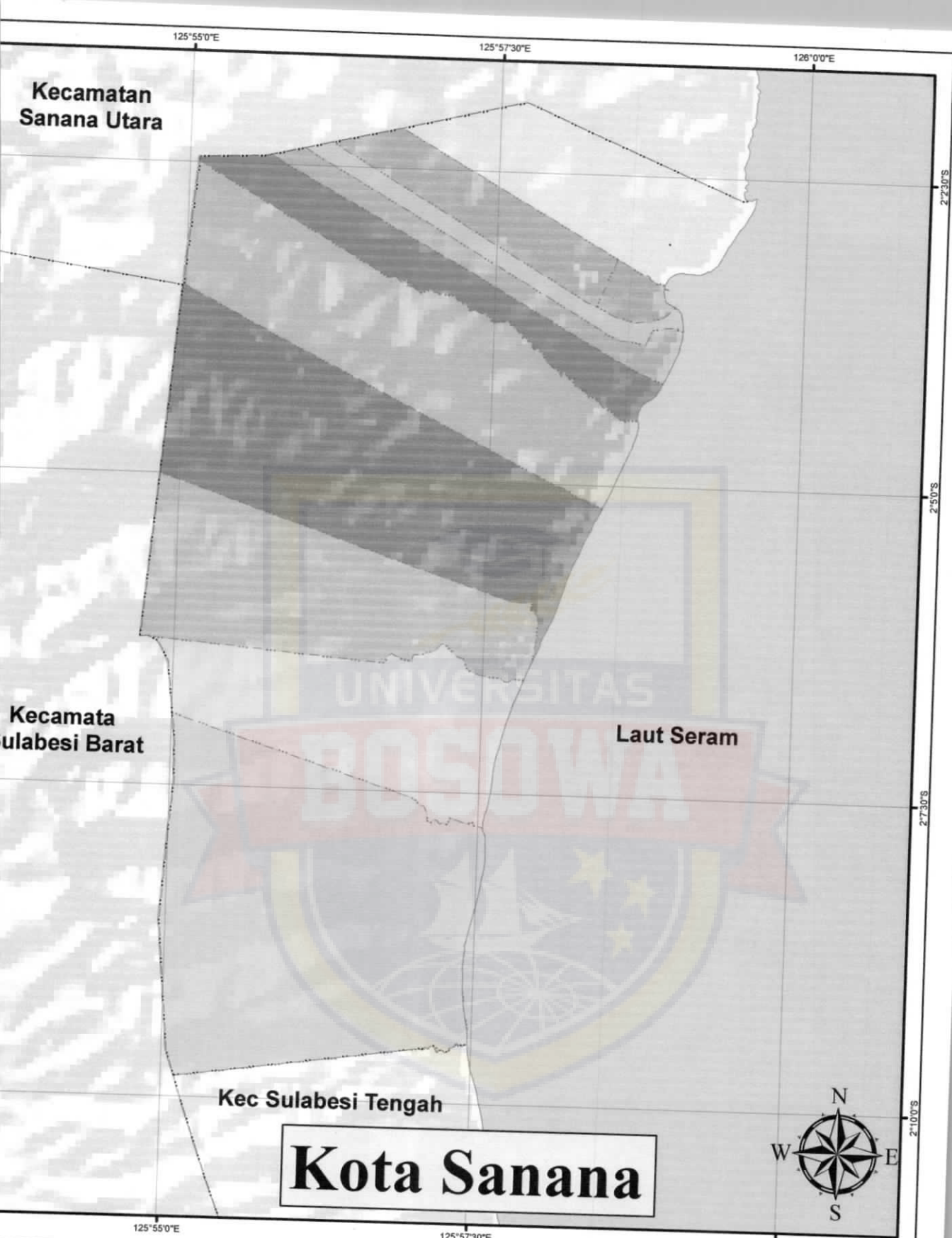
Berdasarkan topografi sebagian besar Desa di Kota Sanana berada pada daerah pesisir dengan ketinggian dari permukaan laut relatif sama mulai dari 0-5 m kecuali Desa Waibau dengan ketinggian dari permukaan laut 1-10 m. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

## Topografi Kota Sanana di Rinci Per Desa Tahun 2012

No	Desa	Letak Geografis	Panjang Pantai	Ketinggian dari Permukaan Laut	Topografi
1	Wai Hama	Pesisir	1-5 Km	0-3 m	Daratan
2	Wai Ipa	Pesisir	1-5 Km	0-2 m	Daratan
3	Fogi	Pesisir	1-5 Km	0-2 m	Daratan
4	Fatce	Pesisir	1-5 Km	0-3 m	Daratan
5	Falahu	Pesisir	1-5 Km	0-2 m	Daratan
6	Fagudu	Pesisir	1-5 Km	0-2 m	Daratan
7	Waibau	Bukan Pesisir	-	1-10 m	Daratan
8	Mangon	Pesisir	< 1 Km	0-3 m	Daratan
9	Wailau	Pesisir	1-5 Km	0-3 m	Daratan
10	Pastina	Pesisir	1-5 Km	0-5 m	Lembah
11	Umaloya	Pesisir	1-5 Km	0-4 m	Daratan

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012



# Kota Sanana

**Judul Skripsi:**  
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kab. Kepulauan Sula

**Bar:**  
Peta Administrasi

**Keterangan:**

	Garis Pantai		Mangon
	Batas Desa		Pastina
	Batas Kecamatan		Umaloya
	Fagudu		Wai Hama
	Falahu		Wai Ipa
	Fatce		Waibau
	Fogi		Wallau

**Pembimbing:**  
1. Ir. Rudi Latief, M.Si  
2. Nursyam Aksa, ST, M.Si  
3. Jufriadi, ST, MSP

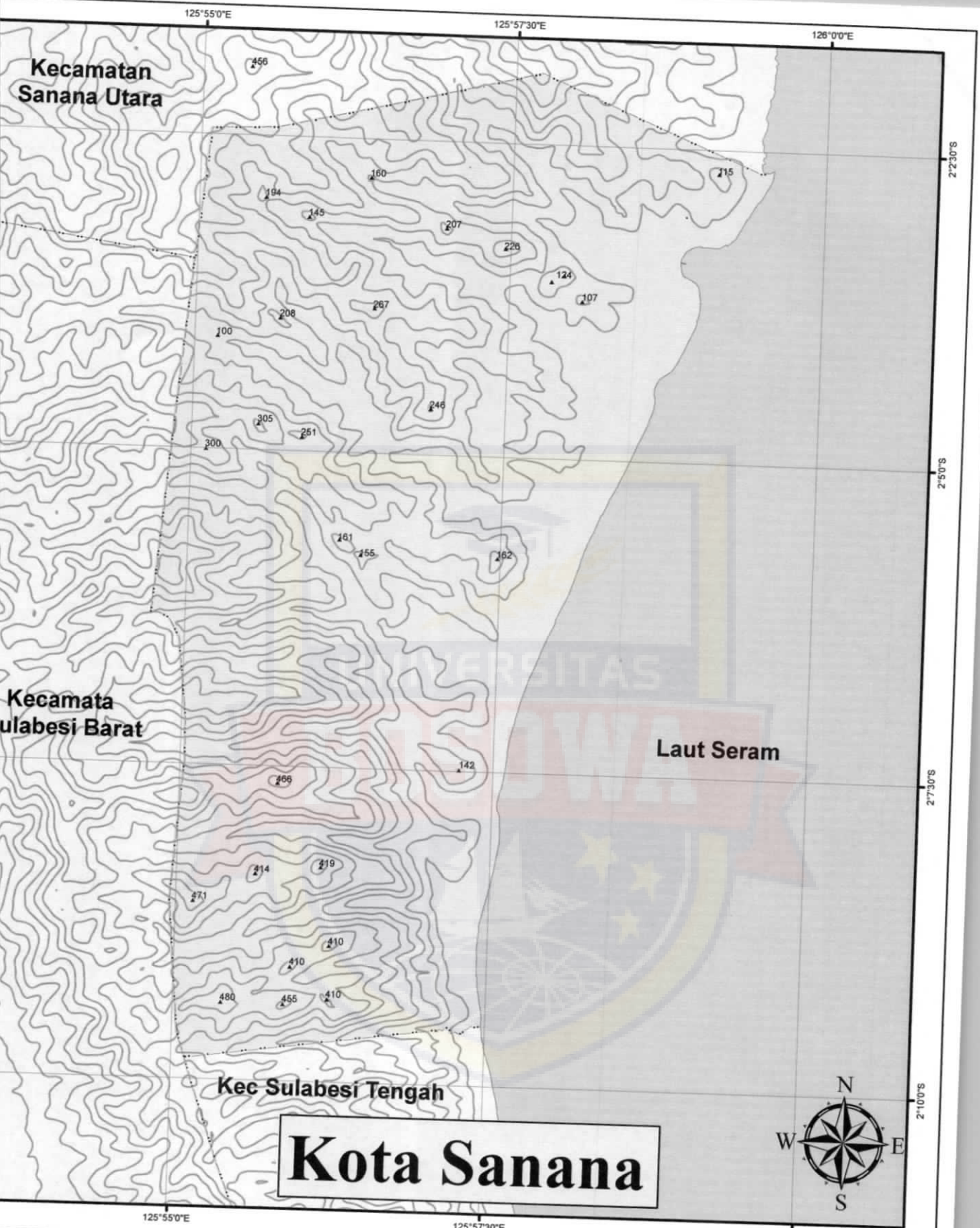
**Mahasiswa:**  
Yusran  
45 06 042 037

**Skala: 1:80.000**

**Sumber:**  
- BAPPEDA Kab. Kep. Sula 2012  
- Survey Lapangan 2012

 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar 2012





# Kota Sanana

**Judul Skripsi:**  
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana Kab. Kepulauan Sula

**Paragraf:**  
Peta Topografi Kota Sanana

Keterangan	
▲	Titik Ketinggian Kec
—	Garis Kontur Interval 50
□	Garis Pantai
⋯	Batas Kecamatan
□	Kab. Kep. Sula
□	Kecamatan Sanana

**Pembimbing:**

1. Ir. Rudi Latief, M.Si
2. Nursyam Aksa, ST, M.Si
3. Jufriadi, ST, MSP

**Mahasiswa:**


Yusran  
45 06 042 037

**Skala: 1:80.000**

**Sumber:**

- BAPPEDA Kab. Kep. Sula 2012
- Survey Lapangan 2012
- Hasil Analisis Ketinggian Data DEM SRTM

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar 2012



### 3) Geologi

Secara umum, sekitar 150.000 Ha dataran Pantai Kepulauan Sula dijumpai jenis tanah Podsolik Merah Kuning yang cocok untuk lahan perkebunan. Sedangkan di lahan kemiringan di atas 15 – 25 persen sebesar 150.000 Ha dengan jenis tanah Podsolik dan Aluvial.

### 4) Hidrologi

Sumber daya air mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, yang digunakan berdasarkan jenis kebutuhan sehari-hari, sumber daya air juga dibutuhkan oleh alam untuk meningkatkan suhu yang dapat mempengaruhi tata kelola masyarakat pada umumnya. Untuk itu sumber daya air di Kota Sanana yang dimanfaatkan masyarakat tiap Desa dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Sumber Air yang dimanfaatkan Masyarakat Kota Sanana Tahun 2012

No	Desa	Sumber Air Bersih	Keberadaan Sungai
1	Wai Hama	Sumur/PDAM	1
2	Wai Ipa	Sumur	1
3	Fogi	PDAM/Sumur	1
4	Fatce	PDAM	-
5	Falahu	PDAM	-
6	Fagudu	PDAM	1
7	Waibau	PDAM	2
8	Mangon	PDAM	1
9	Wailau	Sumur	1
10	Pastina	Sungai/Sumur	1
11	Umaloya	Sumur	1
<b>Sanana</b>			<b>10</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012

## b. Kondisi Sosial Masyarakat

### 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Pada dasarnya aktifitas dan produktifitas penduduk di suatu wilayah bisa dilihat pada usia produktif penduduk di wilayah tersebut. Di Kota Sanana angka usia yang paling tinggi adalah 0-4 tahun atau angka kelahiran dan paling terendah adalah 70-74 tahun atau usia manula. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Kota Sanana Berdasarkan Usia Tahun 2012

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	1.683	1.577	3.260
2	5 - 9	1.797	1.687	3.484
3	10 - 14	1.037	1.933	2.970
4	15 - 19	1.162	1.116	2.278
5	20 - 24	1.032	993	2.025
6	25 - 29	1.163	1.039	2.202
7	30 - 34	1.013	935	1.948
8	35 - 39	910	836	1.746
9	40 - 44	692	626	1.318
10	45 - 49	594	531	1.125
11	50 - 54	509	450	959
12	55 - 59	351	298	649
13	60 - 64	283	213	496
14	65 - 69	189	123	312
15	70 - 74	124	79	203
16	75 +	126	82	208
<b>Jumlah</b>		<b>12.665</b>	<b>12.518</b>	<b>25.183</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Sanana, Tahun 2012

## 2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Sanana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2010 sebanyak 25.183 jiwa yang tersebar di 11 Desa secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.6.

Tabel 4.6  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Sanana dirinci Per Desa Tahun 2012

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wai Hama	939	926	1.865
2	Wai Ipa	1.052	1.093	2.145
3	Fogi	2.021	1.834	3.855
4	Fatce	1.680	1.747	3.427
5	Falahu	739	816	1.555
6	Fagudu	1.446	1.367	2.813
7	Waibau	758	755	1.513
8	Mangon	2.020	2.038	4.058
9	Wailau	1.013	952	1.965
10	Pastina	418	442	860
11	Umaloaya	579	548	1.127
	<b>Sanana</b>	<b>12.665</b>	<b>12.518</b>	<b>25.183</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012

## 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan Nasional yang tercantum dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program pemerintah telah dilaksanakan guna meningkatkan mutu pendidikan sekaligus

pemerataan pendidikan. Program-program tersebut harus senantiasa dievaluasi, untuk melihat tingkat keberhasilan program. Sehingga berbagai ketimpangan, kekurangan, kendala dan hambatan yang mungkin terjadi akan dapat teridentifikasi untuk perbaikan pada implementasi program tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum biasa diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat. Berikut jumlah fasilitas pendidikan yang berada di Kota Sanana sebagaimana pada tabel 4.7.

Tabel 4.7  
Fasilitas Pendidikan di Kota Sanana Tahun 2012

No	Desa	TK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SMU/ Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Wai Hama	1	1	1	-	-
2	Wai Ipa	1	2	1	-	-
3	Fogi	-	1	1	-	-
4	Fatce	1	3	1	2	1
5	Falahu	1	1	-	-	-
6	Fagudu	4	2	1	-	-
7	Waibau	1	1	1	1	-
8	Mangon	1	2	1	-	-
9	Wailau	1	2	1	-	-
10	Pastina	1	1	1	-	-
11	Umaloya	-	1	-	-	-
<b>Sanana</b>		<b>12</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012

#### 4) Sosial Ekonomi Masyarakat

Peningkatan nilai ekonomi masyarakat sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Di Kota Sanana nilai ekonomi masyarakat bisa dikatakan baik dikarenakan penghasilan masyarakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang sumber penghasilan dan mata pencaharian masyarakat di Kota Sanana sebagaimana pada tabel 4.8.

Tabel 4.8  
Mata Pencaharian dan Penghasilan Penduduk Kota Sanana Tahun 2012

No	Desa	Sumber Penghasilan	Komoditas Utama	Penghasilan Per Bulan	Persentase Keluarga Pertanian
1	Wai Hama	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	60
2	Wai Ipa	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	85
3	Fogi	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	55
4	Fatce	Perdagangan dan Jasa	-	> Rp 3.000.000	30
5	Falahu	Perdagangan dan Jasa	-	> Rp 3.000.000	49
6	Fagudu	Perdagangan dan Jasa	-	> Rp 3.000.000	46
7	Waibau	Pertanian	Cengkeh	> Rp 2.000.000	70
8	Mangon	Perdagangan dan Jasa	-	> Rp 3.000.000	5
9	Wailau	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	90
10	Pastina	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	80
11	Umaloya	Pertanian	Kelapa	> Rp 1.500.000	80

Sumber: Kantor Kecamatan Sanana, Tahun 2012

#### 5) Sosial Budaya Masyarakat

Sosial budaya masyarakat/tingkah laku sangat di pengaruhi oleh dimana tempat tinggalnya dan berapa lama berinteraksi didalam lingkungan tersebut. Kecamatan Sanana merupakan ibukota dari Kabupaten Kepulauan Sula jadi sangat berpotensi para pendatang untuk singah dan menetap dalam mengembangkan perekonomian dan

perkembangan diberbagai sektor lainnya. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang berada di Kota Sanana.

### **3. Arahahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Persampahan**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 27 tahun 2004, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kota Sanana adalah sebagai perumus kebijakan teknis di bidang kebersihan, memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan dan , melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kebersihan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar teknis operasional DKP Kota Sanana Peraturan Daerah Kota Sanana Nomor 4 tahun 2007, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan bidang kebersihan yaitu :

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Persampahan;
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran

Selain peraturan perundangan tersebut di atas, Pemkab Sula juga membuat dan mengedarkan himbauan dan kampanye tentang kebersihan sampah melalui media massa dan tempat-tempat umum. Sosialisasi juga dilakukan dengan menyebarkan stiker tentang kampanye kebersihan dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran peraturan.

#### **4. Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Sula**

##### **a. Sumber Sampah**

Sumber timbulan sampah Kota Sanana terdiri atas kegiatan rumah tangga, pasar, rumah sakit, sampah hasil gotong-royong, kawasan wisata, terminal, dan pusat keramaian lainnya. Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sanana melakukan pengukuran timbulan untuk seluruh kota. Dari pengukuran tersebut Kota Sanana didapatkan timbulan harian Kota Sanana sebesar  $36 \text{ m}^3/\text{hr}$  yang terdiri atas  $24 \text{ m}^3$  (66,18%) sampah domestik dan  $12 \text{ m}^3$  (34,33%) sampah non domestik.

Sampah di Kota Sanana terdiri atas 70% organik dan 30 % anorganik (Dinas Tata Kota kebersihan Dan Pemadam kebakaran ). Hasil uji karakteristik sampah di Kota Sanana yang berasal dari sampah di TPA Waikalopa, menunjukkan tingginya nilai kalor, C organik, Phospat, dan rasio C-N. Ini mengindikasikan bahwa sampah di Kota Sanana merupakan bahan dasar kompos yang sangat potensial.



Tabel 4.9.

## Timbulan Sampah Kota Sanana Kepulauan Sula 2011

Deskripsi	Satuan	2011
Jumlah Penduduk Administratif	jiwa	132.524
Cakupan Pelayanan		
Jumlah Penduduk Daerah Pelayanan	jiwa	21.756
Jumlah Penduduk Dilayani	jiwa	18.492
Tingkat Pelayanan	%	85
Volume Sampah		
Laju Timbulan Sampah di Wilayah Pelayanan	L/org/hari	2,75
Timbulan Sampah di Wilayah Pelayanan		
- Domestik	m3/hari	24
- Non Domestik	m3/hari	12
Total	m3/hari	36
Timbulan Sampah Yang Dilayani		
- Domestik	m3/hari	24
- Non Domestik	m3/hari	12
- Total	m3/hari	36
- Prosentase Pelayanan	%	85

Sumber: Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2012

### b. Daerah Pelayanan

Hingga akhir tahun 2011, DTKPP Kabupaten Kepulauan Sula telah melayani 9 Kelurahan. Kelurahan-Kelurahan tersebut sebagian besar terdapat di 2 Kecamatan yang berada di pusat Kota yaitu :

- a. Kecamatan Sanana;
- b. Kecamatan Sanana Utara.

### c. Pola Operasi

Komitmen Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan sampah yang telah terkumpul ditumpuk di bak-bak

sampah (TPS), kemudian baru diangkut langsung ke TPA. Dengan sistem baru sampah tidak lagi dimasukkan ke dalam bak tapi ditumpuk dengan menggunakan karung di TPS dan kemudian langsung di bawa ke TPA. Secara garis besar ada tiga kegiatan dalam sistem pengelolaan sampah Model Kota Sanana , yaitu pengumpulan, pengangkutan dan Pemilahan.

Reduksi sampah terhadap produksi sampah dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan cara melakukan komposting secara langsung oleh masyarakat. Reduksi juga dilakukan oleh pemilah di TPA. Selain itu, reduksi lainnya yang terjadi dikarenakan sampah dibuang secara sembarangan di luar TPS yang disediakan oleh Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

#### **d. Pewadahan**

Pewadahan sampah menggunakan bak dan tong sampah dan sampah dimasukkan ke dalam karung-karung sampah. Sampah kering atau ringan yang bukan benda tajam dimasukkan ke dalam karung dan diikat dengan rapi. Sampah kertas, besi, kaca, kaleng dan benda tajam diletakkan dalam keranjang. Sampah hasil penebangan pohon diikat dengan rapi dan diletakkan di pinggir jalan atau di TPS.

#### **e. Pengumpulan**

Pengumpulan dari rumah tangga ke TPS dikoordinasi oleh Dinas Tata Kota. Peralatan yang digunakan adalah motor sampah roda tiga (Untuk

jalan yang tidak bisa dimasuki mobil sampah). Jumlah becak sampah yang ada di Kota Sanana hingga saat ini sebanyak 2 unit.

#### 1) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

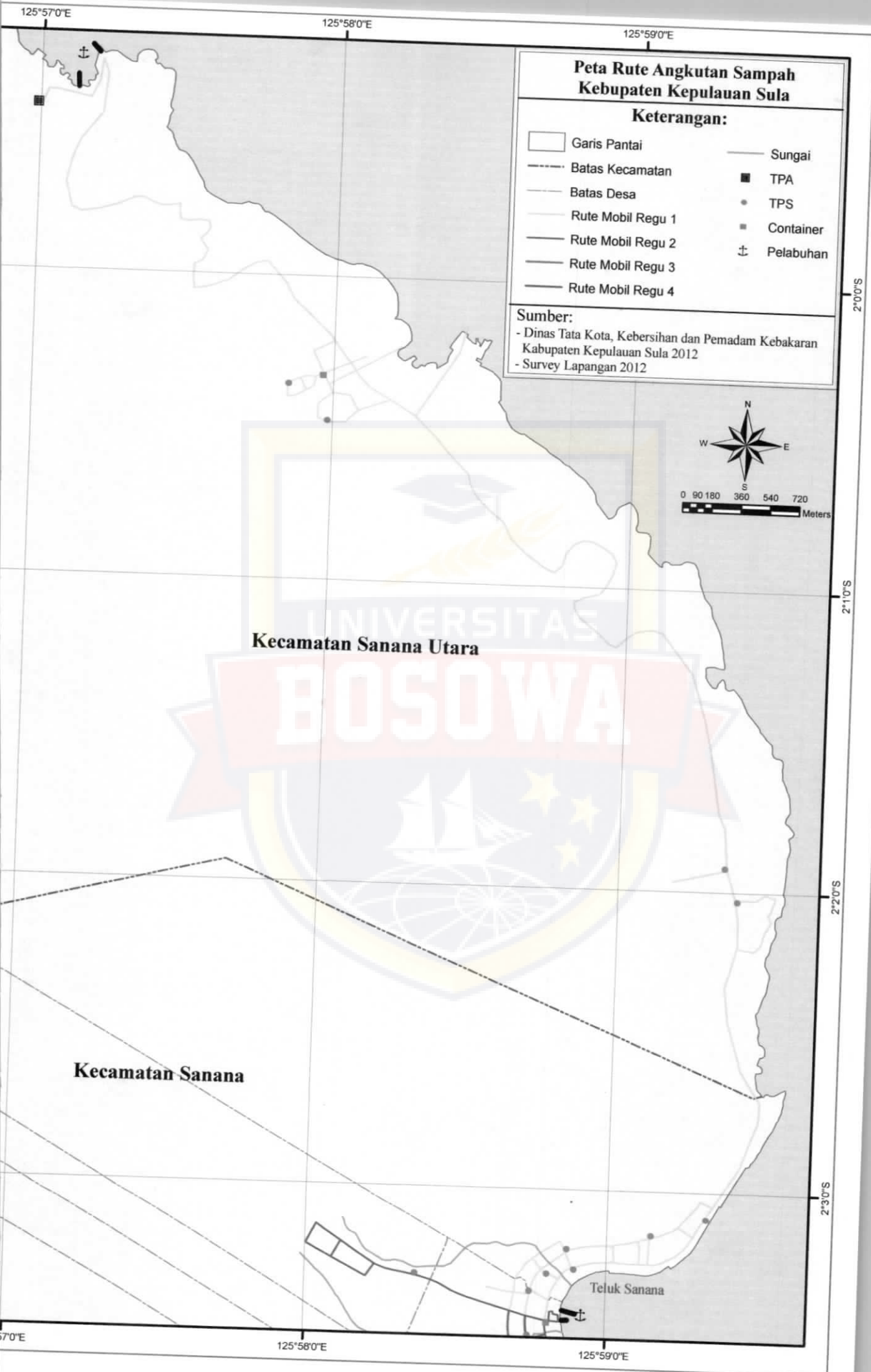
Sampah rumah tangga yang dikumpulkan dalam karung-karung atau keranjang diangkut dari rumah penduduk ke TPS dengan menggunakan beca oleh petugas kebersihan di kelurahan. Petugas sampah mengangkut sampah pada pagi hari jam 5 s/d jam 6 sore hingga selesai.

#### 2) Pengumpulan Pasar

Sampah dari pasar-pasar di Kota Sanana dikelola oleh Dinas Tata Kota, kebersihan dan Pemadam Kebakaran . Sampah pasar langsung diangkut ke TPS oleh petugas pengelola sampah pasar. Kemudian di angkut ke TPA.

#### 3) Pengumpulan Sampah Jalan

Pelayanan pembersihan jalan raya diadakan terutama di jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder disekitar pusat kota. Penyapuan dimulai pada jam 05. pagi hingga selesai. Jumlah petugas penyapuan sebanyak 74 orang terdiri dari 3 pengawas dan 71 orang petugas penyapuan. Petugas ini dilengkapi dengan karung sampah dan sapulidi.

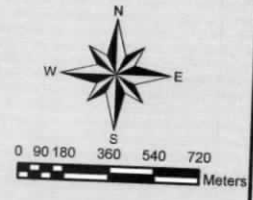


**Peta Rute Angkutan Sampah  
Kabupaten Kepulauan Sula**

**Keterangan:**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| Garis Pantai      | Sungai    |
| Batas Kecamatan   | TPA       |
| Batas Desa        | TPS       |
| Rute Mobil Regu 1 | Container |
| Rute Mobil Regu 2 | Pelabuhan |
| Rute Mobil Regu 3 |           |
| Rute Mobil Regu 4 |           |

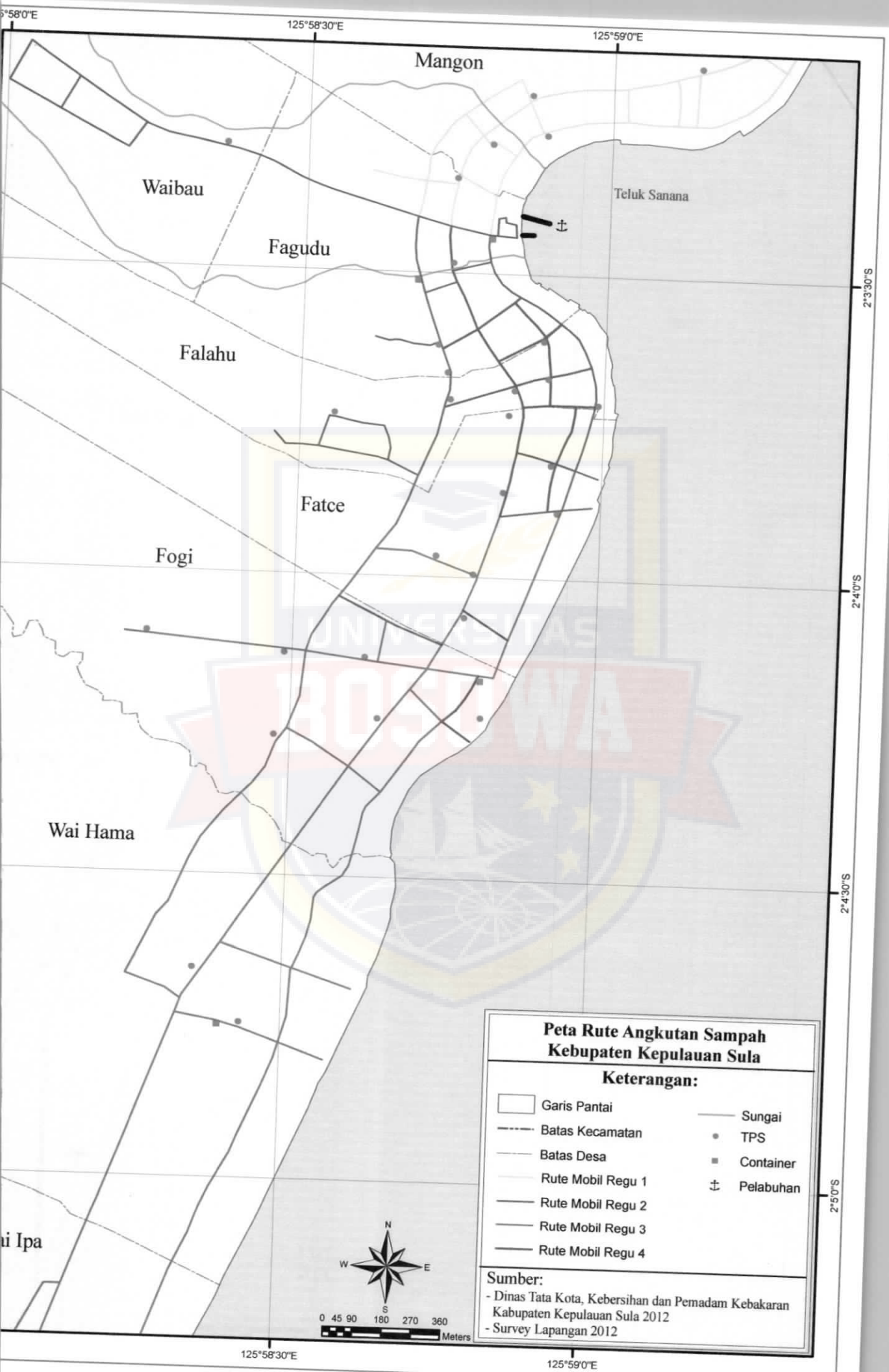
**Sumber:**  
 - Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran  
 Kabupaten Kepulauan Sula 2012  
 - Survey Lapangan 2012



**Kecamatan Sanana Utara**

**Kecamatan Sanana**

Teluk Sanana



**Peta Rute Angkutan Sampah  
Kabupaten Kepulauan Sula**

**Keterangan:**

- |   |                   |   |           |
|---|-------------------|---|-----------|
|  | Garis Pantai      |  | Sungai    |
|  | Batas Kecamatan   |  | TPS       |
|  | Batas Desa        |  | Container |
|  | Rute Mobil Regu 1 |  | Pelabuhan |
|  | Rute Mobil Regu 2 |   |           |
|  | Rute Mobil Regu 3 |   |           |
|  | Rute Mobil Regu 4 |   |           |

**Sumber:**

- Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula 2012
- Survey Lapangan 2012

## 5. Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Masyarakat Kota Sanana

Berdasarkan kondisi objektif dilapangan sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana yaitu dibakar/ditimbun, dibuang kelahan kosong, dibuang ke laut/sungai. Untuk lebuah jelasnya pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10  
Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Masyarakat Kota Sanana

No.	Variabel dan Indikator		Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Masyarakat				
	Variabel	Indikator	Dibakar/ ditimbun	Dibuang kelahan kosong	Dibuang ke laut/sungai	Diabaikan	Jumlah Sampel
1	Usia	Lansia	1	0	2	0	3
		Dewasa	48	13	5	3	69
		Remaja 12-17 Tahun	19	0	2	3	24
		Anak-anak 9-11 Tahun	0	0	0	2	2
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	31	11	6	7	55
		Perempuan	37	2	3	1	43
3	Tingkat Pendidikan	Perguruan Tinggi	15	2	1	2	20
		SMU atau sederajat	51	11	7	3	72
		SLTP atau sederajat	2	0	1	1	4
		SD atau sederajat	0	0	0	2	2
4	Pekerjaan	Wiraswasta	21	4	2	0	27
		PNS, TNI, POLRI	25	5	1	2	33
		Petani	5	2	0	0	7
		Pengangguran	17	2	6	6	31
5	Penghasilan/Pendapatan	Rp 2.000.000/Bln	24	2	2	1	29
		Rp 1.500.000/Bln	3	3	1	1	8
		Rp 1.000.000/Bln	6	1	0	0	7
		Tidak tetap	35	7	6	6	54
6	Lamanya Tingal	Selamanya	41	11	8	5	65
		10-15 tahun	8	0	0	0	8
		5-10 tahun	9	2	0	1	12
		Dibawah 5 tahun	10	0	1	2	13
Total			68	13	9	8	98

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Dari uraian tabel diatas sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Kota Sanana yang paling banyak adalah dibakar/ditimbun dengan jumlah sampel 68 orang dan yang sedikit adalah diabaikan dengan jumlah sampel 8 orang.

#### **6. Peranserta Pihak Swasta dalam Pengelolaan Persampahan**

Bentuk dari peran serta swasta dalam mereduksi volume sampah yang dibuang ke TPA Waikalopa antara lain memanfaatkan timbulan yang bernilai ekonomis seperti kertas bekas, kardus, besi, kaleng, dan plastik, terdiri atas perusahaan-perusahaan pengumpul barang bekas dan pemilik lahan pembuangan barang bekas pakai. Pihak Swasta yang melakukan kegiatan tersebut tidak berbentuk dalam suatu badan hukum tertentu namun masih bersifat perorangan.

Adapun pihak swasta yang bekerja sama dengan Dinas tata Kota Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang berbentuk badan hukum adalah beberapa Perusahaan swasta, bentuk kerja samanya berupa bantuan kendaraan operasional DKP Kota Sanana. Bentuk lain dari keikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan ini adalah dengan melakukan kegiatan pengomposan, pihak swasta yang melakukan kegiatan pengomposan.

## **B. Analisis**

### **1. Analisis Sosial Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah**

Asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai indikator analisis dalam hubungan variabel bebas (X) yaitu Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, pendapatan/Penghasilan dan Lamanya Tinggal dan variabel terikat (Y) yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah, dengan derajat bebas (db) yaitu 9 berdasarkan jumlah tabel kedua variabel tersebut  $(B-1) \times (K-1)$  dengan  $X^2$  tab yaitu 0,05 berarti tabel distribusi nilai chi-kuadrat yaitu 16,919 dan untuk menghitung derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y di gunakan koefisien kontingensi (C), agar nilai C dapat digunakan untuk derajat asosiasi kedua variabel maka dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum ( $C_{maks}$ ) perbandingan antara nilai C dan  $C_{maks}$  dilanjutkan dengan keeratan hubungan variabel X dan Y ditentukan oleh persentase hubungan kedua variabel tersebut (Q).

#### **a. Analisis Penduduk Berdasarkan Usia**

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.



Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan usia masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Usia

No	Usia	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Lansia 55-64 Tahun Keatas	2	3,27	0	0	1	5	0	0	3	3,06
2	Dewasa 18-54 Tahun	49	80,32	5	50	13	65	2	28,57	69	70,4
3	Remaja 12-17 Tahun	9	14,75	5	50	6	30	4	57,14	24	24,48
4	Anak-anak 9-11 Tahun	1	1,63	0	0	0	0	1	14,28	2	2,04
Total		61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 18,159 atau lebih besar dari  $X^2$  tabel 16,919 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 9 ( $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,156 (C) dan nilai derajat assosiasi kedua variabel 0,888 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,17 (Q) yang berada diantara 0,10 dan 0,29 yang berarti hubungan antara usia dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah kurang erat.

#### b. Analisis Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai

peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan jenis kelamin masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Laki-laki	32	52,45	6	60	12	60	5	71,42	55	56,12
2	Perempuan	29	47,54	4	40	8	40	2	28,57	43	43,87
	Total	61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 1,181 atau lebih kecil dari  $X^2$  tabel 7,814 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 3 ( $X^2$  hitung <  $X^2$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,011 (C) dan nilai derajat asosiasi kedua variabel 0,666 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,01 (Q) yang berada diantara 0,01 dan 0,09 yang berarti hubungan antara jenis kelamin dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah dapat diabaikan.

### c. Analisis Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan pendidikan masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Perguruan Tinggi	17	27,86	2	20	1	5	0	0	20	20,4
2	SMU atau sederajat	41	67,21	7	70	18	90	6	85,71	72	73,46
3	SLTP atau sederajat	2	3,27	1	10	1	5	0	0	4	4,08
4	SD atau sederajat	1	1,63	0	0	0	0	1	14,28	2	2,04
Total		61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 13,732 atau lebih kecil dari  $X^2$  tabel 16,919 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 9 ( $X^2$  hitung <  $X^2$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,122 (C) dan nilai derajat assosiasi kedua variabel 0,888 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,13 (Q) yang berada diantara 0,10 dan 0,29 yang berarti hubungan antara pendidikan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah kurang erat.

#### d. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Walaupun pendapatan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain tetapi bisa dibedakan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Berarti apabila pekerjaan berbeda penghasilan pun ikut berubah atau relatif.

#### 1) Pekerjaan

Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan pekerjaan masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Wiraswasta	20	32,78	4	40	2	10	1	14,28	27	27,55
2	PNS, TNI, POLRI	27	44,26	0	0	5	25	1	14,28	33	33,67
3	Petani	2	3,27	0	0	5	25	0	0	7	7,14
4	Pengangguran	12	19,67	6	60	8	40	5	71,42	31	31,63
Total		61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 31,147 atau lebih besar dari  $X^2$  tabel 16,919 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 9 ( $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,241 (C) dan nilai derajat asosiasi kedua variabel 0,888 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,27 (Q) yang berada diantara

0,10 dan 0,29 yang berarti hubungan antara pekerjaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah kurang erat.

- 2) Pendapatan/Penghasilan Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan penghasilan/pendapatan masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan pendapatan/Penghasilan

No	Pendapatan /Penghasilan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Rp 2.000.000/Bln	25	40,98	2	20	1	5	1	14,28	29	29,59
2	Rp 1.500.000/Bln	4	6,55	0	0	4	20	0	0	8	8,16
3	Rp 1.000.000/Bln	5	8,19	2	20	0	0	0	0	7	7,14
4	Tidak tetap	27	44,26	6	60	15	75	6	85,71	54	55,1
Total		61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 20,950 atau lebih besar dari  $X$  tabel 16,919 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 9 ( $X^2$  hitung >  $X$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,176 (C) dan nilai derajat asosiasi kedua variabel 0,888 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,19 (Q) yang berada diantara 0,10 dan 0,29 yang berarti hubungan antara penghasilan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah kurang erat.

### e. Analisis Sosial Lingkungan

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Persentase korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat (X) dengan lamanya tinggal masyarakat (Y) sebagaimana pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16.  
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan  
Lamanya Tinggal

No	Lamanya Tinggal	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Jumlah	
		Apakah saudara mau berpartisipasi									
		Ya		Tidak		Jika kegiatan bakti		Jika dibayar			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Selamanya	39	63,93	5	50	16	80	5	71,42	65	66,32
2	10-15 tahun	6	9,83	1	10	0	0	1	14,28	8	8,16
3	5-10 tahun	8	13,11	2	20	1	5	1	14,28	12	12,24
4	Dibawah 5 tahun	8	13,11	2	20	3	15	0	0	13	13,26
Total		61	100	10	100	20	100	7	100	98	100

Sumber: Hasil Persebaran Kuesioner, Tahun 2012

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat, maka diperoleh  $X^2$  hitung 5,977 atau lebih kecil dari  $X^2$  tabel 16,919 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) 9 ( $X^2$  hitung <  $X^2$  tabel). Dengan nilai hubungan kedua variabel 0,057 (C) dan nilai derajat asosiasi kedua variabel 0,888 ( $C_{maks}$ ). dengan membandingkan nilai C dan  $C_{maks}$  maka diperoleh nilai 0,06 (Q) yang berada diantara

0,01 dan 0,09 yang berarti hubungan antara lamanya tinggal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampah dapat diabaikan.

Hasil rekapitulasi hitungan chi-kuadrat sebagaimana pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17.  
Rekapitulasi Chi-kuadrat

No	Variabel	Nilai X hitung	X tabel	Kategori (C)
1	Usia	18,159	16,919	Berpengaruh
2	Jenis kelamin	1,181	7,814	Tidak Berpengaruh
3	Tingkat pendidikan	13,732	16,919	Tidak Berpengaruh
4	Pekerjaan	31,147		Berpengaruh
5	Pendapatan/penghasilan	20,95		Berpengaruh
6	Lamanya tinggal	5,977		Tidak Berpengaruh

No	Variabel	Nilai C	Cmaks	Kategori (Q)
1	Usia	0,156	0,888	Kurang Erat
2	Pekerjaan	0,241		Kurang Erat
3	Pendapatan/penghasilan	0,176		Kurang Erat

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2012

## 2. Analisis Sistem Pengelolaan Persampahan

### a. Sumber Sampah

Ada beberapa kategori sumber sampah yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu:

- Sumber sampah yang berasal dari daerah perumahan
- Sumber sampah yang berasal dari daerah komersial
- Sumber sampah yang berasal dari fasilitas umum
- Sumber sampah yang berasal dari fasilitas sosial

Klasifikasi kategori sumber sampah tersebut pada dasarnya juga dapat menggambarkan klasifikasi tingkat perekonomian yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan menentukan pola subsidi silang.

### **1) Daerah Perumahan (rumah tangga)**

Sumber sampah di daerah perumahan dibagi atas :

- Perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi (High income)
- Perumahan masyarakat berpenghasilan menengah (Middle income)
- Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah / daerah kumuh (Low income / slum area)

### **2) Daerah komersial.**

Daerah komersial umumnya didominasi oleh kawasan perniagaan, hiburan dan lain-lain. Yang termasuk kategori komersial adalah pasar pertokoan hotel restoran bioskop salon kecantikan industri dan lain-lain

### **3) Fasilitas umum**

Fasilitas umum merupakan sarana / prasarana perkotaan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Yang termasuk dalam kategori fasilitas umum ini adalah perkantoran, sekolah, rumah sakit, apotik, gedung olah raga, museum, taman, jalan, saluran / sungai dan lain-lain.



#### 4) Fasilitas sosial

Fasilitas sosial merupakan sarana prasarana perkotaan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau bersifat sosial. Fasilitas sosial ini meliputi panti-panti sosial (rumah jompo, panti asuhan) dan tempat-tempat ibadah (mesjid, gereja pura, dan lain-lain)

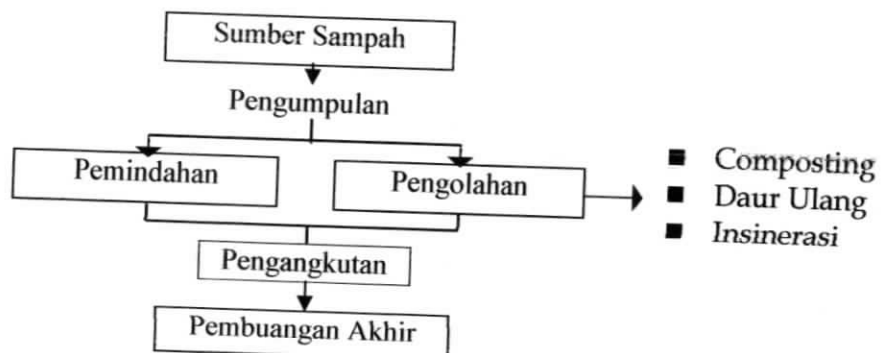
#### 5) Sumber lain

Dari klasifikasi sumber-sumber sampah tersebut, dapat dikembangkan lagi jenis sumber-sumber sampah yang lain sesuai dengan kondisi kotanya atau peruntukan tata guna lahannya. Sebagai contoh sampah yang berasal dari tempat pemotongan hewan atau limbah pertanian ataupun buangan dari instalasi pengolahan air limbah (*sludge*), dengan catatan bahwa sampah atau limbah tersebut adalah bersifat padat dan bukan kategori sampah B3.

#### b. Pola Operasional

Pola operasional penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

#### Diagram Operasional Penanganan Sampah



Gambar 4.1. diagram operasional penanganan sampah

### **1) Pewadahan**

- Wadah sampah individual (disumber) disediakan oleh setiap penghasil sampah sendiri sedangkan wadah komunal dan pejalan kaki disediakan oleh pengelola dan atau swasta. spesifikasi wadah sedemikian rupa sehingga memudahkan operasionalnya, tidak permanen dan higienis. Akan lebih baik apabila ada pemisahan wadah untuk sampah basah dan sampah kering
- Pengosongan sampah dari wadah individual dilakukan paling lama 2 hari sekali sedangkan untuk wadah komunal harus dilakukan setiap hari

### **2) Pengumpulan**

- Pengumpulan sampah dari sumber dapat dilakukan secara langsung dengan alat angkut (untuk sumber sampah besar atau daerah yang memiliki kemiringan lahan cukup tinggi) atau tidak langsung dengan menggunakan gerobak (untuk daerah teratur) dan secara komunal oleh masyarakat sendiri (untuk daerah tidak teratur)
- Penyapuan jalan diperlukan pada daerah pusat kota seperti ruas jalan protokol, pusat perdagangan, taman kota dan lain-lain.

### **3) Pemindahan**

- Pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke alat angkut (truk) dilakukan di transfer depo atau container untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan

- Lokasi pemindahan harus dekat dengan daerah pelayanan atau radius  $\pm 500$  m
- Pemindahan skala kota ke stasiun transfer diperlukan bila jarak ke lokasi TPA lebih besar dari 25 km.

#### 4) Pengangkutan

- Pengangkutan secara langsung dari setiap sumber harus dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak memungkinkan cara operasi lainnya atau pada daerah pelayanan tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan maupun estetika dengan memperhitungkan besarnya biaya operasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa
- Penetapan rute pengangkutan sampah harus didasarkan pada hasil survey *time motion study* untuk mendapatkan jalur yang paling efisien.
- Jenis truk yang digunakan minimal dump truck yang memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolis, efisien dan cepat
- Penggunaan arm roll truck dan compactor truck harus mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan

#### 5) Pengolahan

- Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan

- Teknologi pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pembuatan kompos, pembakaran sampah secara aman (bebas CO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan dioxin), pemanfaatan gas metan dan daur ulang sampah. Khusus pemanfaatana gas metan TPA (landfill gas), dapat masuk dalam CDM (clean developmant mechanism) karena secara signifikan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpengaruh pada iklim global.
- Skala pengolahan sampah mulai dari individual, komunal (kawasan), skala kota dan skala regional.
- Penerapan teknologi pengolahan harus memperhatikan aspek lingkungan, dana, SDM dan kemudahan operasional

#### 6) Pembuangan akhir

- Pemilihan lokasi TPA harus mengacu pada SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA. Agar keberadaan TPA tidak mencemari lingkungan, maka jarak TPA ke badan air penerima > 100m, ke perumahan terdekat > 500 m, ke airport 1500 m (untuk pesawat propeler) dan 3000 m (untuk pesawat jet). Selain itu muka air tanah harus > 4 m, jenis tanah lempung dengan nilai K < 10<sup>-6</sup> cm/det.
- Metode pembuangan akhir minimal harus dilakukan dengan *controlled landfill* (untuk kota sedang dan kecil) dan *sanitary landfill* (untuk kota besar dan metropolitan) dengan “sistem sel”

- Prasarana dasar minimal yang harus disediakan adalah jalan masuk, drainase keliling dan pagar pengaman (dapat berfungsi sebagai *buffer zone*)
- Fasilitas perlindungan lingkungan yang harus disediakan meliputi lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, pengolahan lindi dan ventilasi gas / flaring atau landfill gas extraction untuk mengurangi emisi gas.
- Fasilitas operasional yang harus disediakan berupa alat berat (buldozer, excavator, loader dan atau landfill compactor) dan stok tanah penutup
- Penutupan tanah harus dilakukan secara harian atau minimal secara berkala dengan ketebalan 20 - 30 cm
- Penyemprotan insektisida harus dilakukan apabila penutupan sampah tidak dapat dilakukan secara harian
- Penutupan tanah akhir harus dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas TPA
- Kegiatan pemantauan lingkungan harus tetap dilakukan meskipun TPA telah ditutup terutama untuk gas dan efluen leachate, karena proses dekomposisi sampah menjadi gas dan leachate masih terus terjadi sampai 25 tahun setelah penutupan TPA
- Manajemen pengelolaan TPA perlu dikendalikan secara cermat dan membutuhkan tenaga terdidik yang memadai

- Lahan bekas TPA direkomendasikan untuk digunakan sebagai lahan terbuka hijau.

### **c. Aspek Institusi**

- Penyelenggara pembangunan prasarana dan sarana persampahan dapat dilakukan secara sendiri atau terpadu oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Swasta dan masyarakat
- Bentuk institusi dan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara umum bentuk institusi yang ada adalah perusahaan daerah kebersihan (PDK), dinas kebersihan (DK), dinas kebersihan dan pertamanan (DKP), seksi kebersihan dan lain-lain. Struktur organisasi sebaiknya mencerminkan kegiatan utama penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk memiliki bagian perencanaan, retribusi, penyuluhan dan lain-lain.
- Instansi pengelola persampahan sebaiknya memiliki pola kerja sama dengan instansi terkait termasuk PLN (untuk kerjasama penarikan retribusi) dan kerja sama antar kota untuk pola penanganan sampah secara regional dan kerja sama dengan masyarakat atau perguruan tinggi.
- SDM sebaiknya memiliki keahlian bidang persampahan baik melalui pendidikan formal (ada staf yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, ekonomi, ahli manajemen dll) dan training bidang persampahan.

- Kegiatan pengelolaan sampah yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan harus dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus dengan melibatkan instansi terkait, LSM dan perguruan tinggi.

#### **d. Aspek Pembiayaan**

##### **1) Sumber Pembiayaan**

- Pengelolaan persampahan dapat dibiayai dari swadaya masyarakat, investasi swasta dan APBN / APBD.
- Tata cara pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembangunan prasarana dan sarana persampahan dalam bentuk dana maupun aset kepada masyarakat.
- Pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan wadah individual menjadi tanggung jawab penghasil sampah.

##### **2) Tarif Retribusi**

- Biaya untuk penyediaan prasarana dan sarana pengumpulan serta pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dikenakan pada anggota masyarakat yang mendapat pelayanan dalam bentuk iuran (besarnya ditentukan melalui musyawarah dan mufakat) dan dikordinasikan dengan pihak instansi pengelola persampahan
- Biaya untuk pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau swasta untuk kepentingan masyarakat

dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi kebersihan.

Biaya pengelolaan tersebut meliputi biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan

- Penentuan tarif retribusi disusun berdasarkan asas keterjangkauan /willingness to pay (secara umum kemampuan masyarakat membayar retribusi adalah 1-2 % dari income) dan subsidi silang dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah dan dari sektor komersial ke non komersial tanpa meninggalkan prinsip ekonomi/*cost recovery* (minimal 80%, 20% merupakan subsidi Pemerintah kota/kab untuk pembersihan fasilitas umum).
- Mekanisme penarikan retribusi selain dilakukan langsung oleh instansi pengelola juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PLN, PDAM, RT/RW dan lain-lain sesuai dengan kondisi daerah pelayanan.

#### **e. Aspek Peraturan**

- Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan persampahan adalah UU No 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No 23/1997 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup, UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang, UU No 23/1992 tentang Kesehatan, UU No 2/1992 Perumahan dan Permukiman



- Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan masalah persampahan adalah PP tentang Badan Layanan Umum, PP No 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 27 tahun 1999 tentang Amdal, PP No. 18 jo 85/1999 tentang Limbah B3 dan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
- Agenda 21 berkaitan dengan program optimalisasi minimalisasi limbah secara bertahap sampai tahun 2020, Kyoto Protocol tentang CDM (clean development mechanism), MDGs tentang upaya pencapaian target pengurangan jumlah orang miskin dan akses terhadap air minum dan sanitasi (target 10 dan 11)
- SNI yang berkaitan dengan pedoman persampahan adalah SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, SNI tentang Spesifikasi Controlled Landfill, SK SNI S-04-1992-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Kota Sedang dan Kota Kecil, SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman, SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA, SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah.
- Pengaturan penyelenggaraan pembangunan bidang persampahan dilakukan melalui peraturan daerah (perda) yang pada umumnya terdiri dari perda pembentukan institusi, ketentuan umum kebersihan dan retribusi. Selain itu juga diperlukan perda yang mengatur

mengenai peran serta swasta, penanganan limbah B3 / rumah sakit dan lain-lain.

### **3. Analisis Sistem Pengelolaan Persampahan yang dilakukan Masyarakat Kota Sanana**

Peran serta masyarakat dan sistem pengelolaan formal membentuk keseimbangan perilaku dalam sistem pengelolaan persampahan dan tidak mencampur-adukkan peran serta masyarakat kedalam peran institusi formal dalam aspek pengelolaan. Kebutuhan peran serta masyarakat tidak berarti dalam rangka menutupi kekurangan sistem formal. Peran serta masyarakat mempunyai proporsi peran tersendiri, demikian pula sistem formal pengelolaan sampah (LKMD, RT, RW).

Dengan menggunakan metode observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat kondisi objektif masyarakat tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dan metode kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan agar dapat menganalisis sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat secara relevan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan sistem pengelolaan persampahan masyarakat Kota Sanana terdapat beberapa cara pengelolaan yang paling dominan antara lain yaitu dibakar, timbun, dibuang dilahan kosong, dibuang ke laut/sungai, tergantung jenis sampah dan dimana mereka bermukim. Misalnya masyarakat yang bermukim Desa yang tidak dilayani pelayanan persampahan dari pemda antara lain desa Umaloya, Pastina, Wailau dan daerah di pinggiran sungai atau di pesisir pantai mereka lebih dominan

membuang sampah ke sungai atau laut dan apabila sampahnya non organik mereka akan membakar atau menimbunnya dan membiarkan sampah tersebut terurai dengan tanah. Dari penjabaran diatas bila dilihat dari pendekatan teori tentang partisipasi masuk dalam tipe partisipasi *self mobilizatio* yaitu:

- a. Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;
- b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan;
- c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

#### **4. Analisis Peranserta Pihak Swasta dalam Pengelolaan Persampahan**

##### **a. Peranserta Masyarakat**

- 1) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan diperlukan sejak dari perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan.
- 2) Peran serta masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dapat berupa usulan, saran, pertimbangan, keberatan serta bantuan lainnya atau pelaksanaan program 3R baik untuk skala individual maupun skala kawasan.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan formal sejak dini, penyuluhan yang intensif, terpadu dan terus menerus serta diterapkannya sistem insentif dan disinsentif

- 4) Masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pewadahan dan atau menyelenggarakan pengumpulan / pengolahan sampah.

**b. Kemitraan**

- 1) Pemerintah memberikan peluang kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif
- 2) Kemitraan dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kegiatan sistem pembangunan persampahan, termasuk melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- 3) Pola kemitraan dapat dilakukan melalui studi kelayakan dengan memperhatikan keterjangkauan masyarakat, kemampuan Pemda, peluang usaha dan keuntungan swasta.
- 4) Kemitraan dapat dilakukan dengan sistem BOO, BOT, kontrak manajemen, kontrak konsesi dan lain-lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka hasil kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Ada enam faktor yang dipakai dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yaitu faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan/penghasilan dan lamanya tinggal, dari keenam faktor tersebut ada tiga faktor yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan yaitu faktor usia, pekerjaan, dan pendapatan/penghasilan. Artinya semakin tua seseorang semakin melakukan kegiatan kebersihan sedangkan pekerjaan mengindikasikan bahwa seseorang memiliki pekerjaan tetap selalu ingin melibatkan diri dalam kegiatan kebersihan dan penghasilan mengindikasikan bahwa, semakin tinggi pendapatasn seseorang juga akan melibatkan diri dalam kegiatan kebersihan.
2. Berdasarkan hasil variabel yang berpengaruh meliputi usia, pekerjaan dan pendapatan/penghasilan memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi adalah kurang erat dalam pengelolaan persampahan. Hal ini disebabkan antara variabel usia dan patisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah  $Q = 17,58 = 0,1758$ , variabel perkerjaan dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan persampahan adalah  $Q = 27,13 = 0,2713$ , variabel pendapatan/penghasilan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah  $Q = 19,18 = 0,1918$  yang dinyatakan hubungan kurang erat jika  $Q$  antara 0,10 dan 0,29.

3. Sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat di Kota Sanana yang paling dominan adalah dibakar/ditimbun, dibuang kelahan kosong dan dibuang kelaut atau sungai dan yang paling banyak adalah dibakar/ditimbun dengan jumlah sampel 68 orang dan yang sedikit adalah diabaikan dengan jumlah sampel 8 orang dari 98 orang. Hal ini berarti masih tinggi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Sanana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil uraian diatas tentang sistem pengelolaan persampahan di Kota Sanana ada tiga hal yang dapat disarankan yaitu:

1. Perlunya sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah dan mengejak untuk mengelola sampah dengan pendekatan 3R.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengandung unsur politik tetapi untuk kepentingan bersama.
3. Lebih diperluas daerah operasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Sula, lebih ditingkatkan pelayanan masyarakat dan memperbanyak sarana dan prasarana persampahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa*. Universitas "45". Makassar.
- Alfiandra. 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Anonim. 2012. *Profil Persampahan Kota Sanana*. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
- \_\_\_\_\_. BPS. Kabupaten Kepulauan Sula dalam Angka, 2012
- \_\_\_\_\_. BPS. Kecamatan Sanana dalam Angka, 2012
- \_\_\_\_\_. 1986. *Materi Training untuk Tingkat Staf Teknis Proyek PLP Sektor Persampahan*. Direktorat Jenderal Cipta Karya: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. SNI 19-2454-2002. *Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Arisal. 1997. *Studi Pengelolaan Sampah di Kota Watan Soppeng, Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas "45": Makassar.
- Damanhuri. E. & Tri. P. 2004. *Diktat Kuliah Teknik Lingkungan Pengelolaan Sampah*. Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Diakses Melalui Internet, Hari Jumat, Tanggal 16 Desember 2011, Jam 02:30 PM-02:49 PM
- <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
- Sayadi. 2011. *Iplementasi Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas "45". Makassar.
- Sudradjat, H.R. 2009. *Mengelola Sampah Kota*. Penabar Swadaya. Jakarta.
- Santoso, Nurman. 1990. *Pendidikan di Indonesia (Dari Masa ke Masa)*. Haji Masagung. Jakarta.



Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, *et al.* *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.

Wibisono, C. 1989. *Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia*. Management dan Usahawan Indonesia, Desember.





**LAMPIRAN**



## LAMPIRAN A. Dekomentasi

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula



Salah satu tempat sampah hasil swadaya masyarakat



### Sarana angkutan Sampah



### Proses pengangkutan sampah



Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran  
berserta Petugas Pengangkut Sampah



## TPA Waikalopa



## Rumah Pengelolaan Sampah



Sampah yang berserakan



Salah satu warga yang sedang membuang sampah di laut



Dinas-dinas yang terkait dalam membantu penyelaian skripsi ini



LAMPIRAN B. Kuesioner

DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER

Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan  
Pengelolaan Persampahan di Kota Sanana

NO. RESPONDEN :  
TANGGAL :  
SURVEYOR :

Isilah kuesioner ini dengan benar dan jujur. Berikan tanda  berdasarkan data dari yang tersedia.

Terima kasih atas kerjasamanya.

DATA DIRI RESPONDEN

Nama : .....

Alamat : .....

1. Berapa usia saudara/i

- a. Lansia: 55-64 tahun keatas
- b. Dewasa: 18-54 tahun
- c. Remaja 12-17 tahun
- d. Anak-anak 9-11 tahun

2. Jenis kelamin

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Tingkat pendidikan saudara/i

- a. Perguruan Tinggi
- b. SMU atau sederajat
- c. SLTP atau sederajat
- d. SD atau sederajat

Pekerjaan saudaran/i

- a. Wiraswasta
- b. PNS, TNI, POLRI
- c. Petani
- d. Pengangguran



5. Penghasilan/pendapatan saudara/i

- a. Rp 2.000.000/ Bln
- b. RP 1.500.000/ Bln
- c. Rp 1.000.000/ Bln
- d. Tidak tetap

6. Lamanya saudara/i tinggal dilingkungan ini

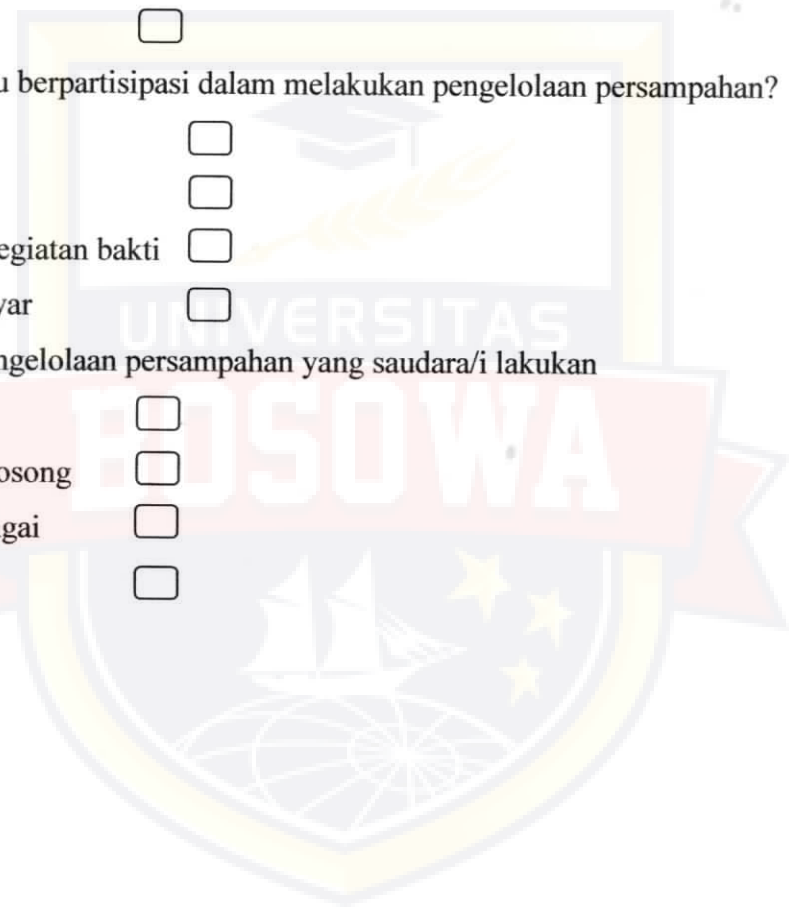
- a. Selamanya
- b. 10-15 tahun
- c. 5-10 tahun
- d. Dibawah 5 tahun

7. Apakah saudara/i mau berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan persampahan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Mau apabila ada kegiatan bakti
- d. Mau apabila dibayar

8. Bagaimana sistem pengelolaan persampahan yang saudara/i lakukan

- a. Dibakar/ditimbun
- b. Dibuang dilahan kosong
- c. Dibuang dilaut/sungai
- d. Diabaikan saja



Lampiran C. 1

Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Usia

Y	X				$\sum n$	$\sqrt{fH}$				$X^2$				$\Sigma$
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$		1	2	3	4	1	2	3	4	
$Y_1$	2	0	1	0	3	1,8673469	0,3061224	0,6122449	0,2142857	0,00942344	0,24557823	0,21428571	0,775409836	
$Y_2$	49	5	13	2	69	42,94898	7,0408163	14,081633	4,9285714	0,85251963	0,59154096	1,74016563	3,267308149	
$Y_3$	9	5	6	4	24	14,93878	2,4489796	4,8979592	1,7142857	2,36090666	0,24795918	3,04761905	8,313797814	
$Y_4$	1	0	0	1	2	1,244898	0,2040816	0,4081633	0,1428571	0,04817665	0,20408163	0,40816327	5,803278689	
$\sum n$	61	10	20	7	98								18,15979449	
$X^2$ hitung														18,15979449
db														9
$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$														16, 919
Kesimpulan														Tolak Ho
C														0,156334596
$C_{maks}$														0,888888889
Q														0,17587642

Keterangan:

- Y = Usia
- $Y_1$  = Lansia 55-64 Tahun Keatas
- $Y_2$  = Dewasa 18-54 Tahun
- $Y_3$  = Remaja 12-17 Tahun
- $Y_4$  = Anak-anak 9-11 Tahun

- X = Apakah saudara mau berpartisipasi
- $X_1$  = Ya
- $X_2$  = Tidak
- $X_3$  = Mau jika ada kegiatan bakti
- $X_4$  = Mau jika dibayar

- $X^2$  = Resultan Chi Kuadrat
- Db = Derajat Bebas
- fh = Frekuensi Harapan
- $\sum n$  = Jumlah Responden

Kurang Erat

Lampiran C. 2

Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Jenis Kelamin

Y \ X	X				$\Sigma n$	fh				$X^2$				$\Sigma$
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$		1	2	3	4	1	2	3	4	
$Y_1$	32	6	12	5	55	34,234694	5,6122449	11,22449	3,9285714	0,14587122	0,02679035	0,05358071	0,29220779	0,518450075
$Y_2$	29	4	8	2	43	26,76531	4,3877551	8,7755102	3,0714286	0,18657947	0,03426673	0,06853346	0,37375415	0,663133816
$\Sigma n$	61	10	20	7	98									
$X^2$ hitung														
db	3													
$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$	7, 814													
Kesimpulan	Terima $H_0$													
C	0,01191334													
$C_{maks}$	0,6666666667													
Q	0,017870009													
	Diabaikan													

Keterangan:

$Y =$  Jenis Kelamin/kepribadian

$Y_1 =$  Laki-laki

$Y_2 =$  Perempuan

$X =$  Apakah saudara mau berpartisipasi

$X_1 =$  Ya

$X_2 =$  Tidak

$X_3 =$  Mau jika ada kegiatan bakti

$X_4 =$  Mau jika dibayar

$X^2 =$  Resultan Chi Kuadrat

$Db =$  Derajat Bebas

$fh =$  Frekuensi Harapan

$\Sigma n =$  Jumlah Responden

## Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Tingkat Tingakat Pendidikan

Y	X	X				$\Sigma n$	fh				$X^2$				$\Sigma$
		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y	Y <sub>1</sub>	17	2	1	0	20	12,44898	2,0408163	4,0816327	1,4285714	1,66373369	0,00081633	2,32663265	1,42857143	5,419754098
	Y <sub>2</sub>	41	7	18	6	72	44,81633	7,3469388	14,693878	5,1428571	0,32497863	0,01638322	0,74387755	0,14285714	1,228096539
	Y <sub>3</sub>	2	1	1	0	4	2,489796	0,4081633	0,8163265	0,2857143	0,0963533	0,85816327	0,04132653	0,28571429	1,281557377
	Y <sub>4</sub>	1	0	0	1	2	1,244898	0,2040816	0,4081633	0,1428571	0,04817665	0,20408163	0,40816327	5,14285714	5,803278689
	$\Sigma n$	61	10	20	7	98									13,7326867
$X^2$ hitung															13,7326867
db															9
$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$															16, 919
Kesimpulan															Terima Ho
C															0,122906619
Cmaks															0,888888889
Q															0,138269946

## Keterangan:

Y = Tingkat Pendidikan  
 Y<sub>1</sub> = Perguruan Tinggi  
 Y<sub>2</sub> = SMU atau sederajat  
 Y<sub>3</sub> = SLTP atau sederajat  
 Y<sub>4</sub> = SD atau sederajat

X = Apakah saudara mau berpartisipasi  
 X<sub>1</sub> = Ya  
 X<sub>2</sub> = Tidak  
 X<sub>3</sub> = Mau jika ada kegiatan bakti  
 X<sub>4</sub> = Mau jika dibayar

$X^2$  = Resultan Chi Kuadrat  
 Db = Derajat Bebas  
 fh = Frekuensi Harapan  
 $\Sigma n$  = Jumlah Responden

Kurang Erat

## Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Pekerjaan

Y	X	X				$\Sigma n$	fh				$X^2$				$\Sigma$
		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>		1	2	3	4	1	2	3	4	
Y	Y <sub>1</sub>	20	4	2	1	27	16,806122	2,755102	5,5102041	1,9285714	0,60697248	0,56250945	2,23613001	0,44708995	3,852701882
	Y <sub>2</sub>	27	0	5	1	33	20,54082	3,3673469	6,7346939	2,3571429	2,03112929	3,36734694	0,44681509	0,78138528	6,626676602
	Y <sub>3</sub>	2	0	5	0	7	4,357143	0,7142857	1,4285714	0,5	1,27517564	0,71428571	8,92857143	0,5	11,41803279
	Y <sub>4</sub>	12	6	8	5	31	19,295918	3,1632653	6,3265306	2,2142857	2,75863651	2,54391047	0,44265964	3,50460829	9,249814913
	$\Sigma n$	61	10	20	7	98									31,14722618
	$X^2$ hitung														31,14722618
	db														9
	$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$														16,919
	Kesimpulan														Tolak Ho
	C														0,241176114
	Cmaks														0,888888889
	Q														0,271323129

## Keterangan:

Y = Pekerjaan

Y<sub>1</sub> = WiraswastaY<sub>2</sub> = PNS, TNI, POLRIY<sub>3</sub> = PetaniY<sub>4</sub> = Pengangguran

X = Apakah saudara mau berpartisipasi

X<sub>1</sub> = YaX<sub>2</sub> = TidakX<sub>3</sub> = Mau jika ada kegiatan baktiX<sub>4</sub> = Mau jika dibayar $X^2$  =

Db =

fh =

 $\Sigma n$  =

Resultan Chi Kuadrat

Derajat Bebas

Frekuensi Harapan

Jumlah Responden

Kurang Erat

## Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Pendapatan/Penghasilan

Y	X				$\Sigma n$	fh				$X^2$				$\Sigma$
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$		1	2	3	4	1	2	3	4	
$Y_1$	25	2	1	1	29	18,05102	2,9591837	5,9183673	2,0714286	2,67510181	0,31090781	4,08733286	0,55418719	7,627529678
$Y_2$	4	0	4	0	8	4,979592	0,8163265	1,6326531	0,5714286	0,19270659	0,81632653	3,43265306	0,57142857	5,013114754
$Y_3$	5	2	0	0	7	4,357143	0,7142857	1,4285714	0,5	0,09484778	2,31428571	1,42857143	0,5	4,337704918
$Y_4$	27	6	15	6	54	33,612245	5,5102041	11,020408	3,8571429	1,30076949	0,04353741	1,43707483	1,19047619	3,971857923
$\Sigma n$	61	10	20	7	98									20,95020727
$X^2$ hitung														20,95020727
db														9
$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$														16, 919
Kesimpulan														Tolak Ho
C														0,176125858
$C_{maks}$														0,888888889
Q														0,19814159

## Keterangan:

Y = Penghasilan /Pendapatan

 $Y_1$  = Rp 2.000.000/Bln $Y_2$  = Rp 1.500.000/Bln $Y_3$  = Rp 1.000.000/Bln $Y_4$  = Tidak tetap $X$  = Apakah saudara mau berpartisipasi $X_1$  = Ya $X_2$  = Tidak $X_3$  = Mau jika ada kegiatan bakti $X_4$  = Mau jika dibayar $X^2$  =

Db =

fh =

 $\Sigma n$  =

Resultan Chi Kuadrat

Derajat Bebas

Frekuensi Harapan

Jumlah Responden

Kurang Erat

Lampiran C.6  
 Hasil Uji Chi Kuadrat Variabel Lamanya Tinggal

Y	X				$\Sigma n$	fh				$X^2$				$\Sigma$
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$		1	2	3	4	1	2	3	4	
$Y_1$	39	5	16	5	65	40,459184	6,6326531	13,265306	4,6428571	0,0526263	0,40188383	0,56376766	0,02747253	1,045750315
$Y_2$	6	1	0	1	8	4,979592	0,8163265	1,6326531	0,5714286	0,20910003	0,04132653	1,63265306	0,32142857	2,204508197
$Y_3$	8	2	1	1	12	7,469388	1,2244898	2,4489796	0,8571429	0,03769377	0,49115646	0,85731293	0,02380952	1,409972678
$Y_4$	8	2	3	0	13	8,0918367	1,3265306	2,6530612	0,9285714	0,00104228	0,34191523	0,04536892	0,92857143	1,316897856
$\Sigma n$	61	10	20	7	98									5,977129046
$X^2$ hitung														5,977129046
db														9
$X^2$ tabel $\alpha = 0,05$														16,919
Kesimpulan														Terima
C														Ho
$C_{maks}$														0,057485036
Q														0,888888889
														0,064670666

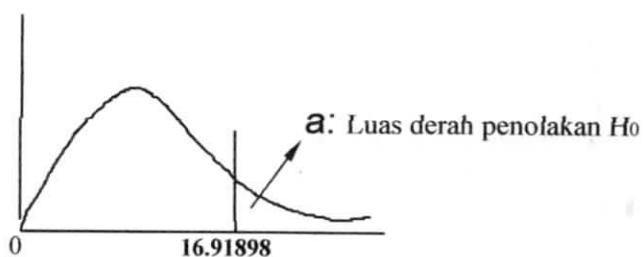
Keterangan:

- $Y =$  Lamanya tinggal
- $Y_1 =$  Selamanya
- $Y_2 =$  10-15 tahun
- $Y_3 =$  5-10 tahun
- $Y_4 =$  Dibawah 5 tahun

- $X =$  Apakah saudara mau berpartisipasi
- $X_1 =$  Ya
- $X_2 =$  Tidak
- $X_3 =$  Mau jika ada kegiatan bakti
- $X_4 =$  Mau jika dibayar

- $X^2 =$  Resultan Chi Kuadrat
- $Db =$  Derajat Bebas
- $fh =$  Frekuensi Harapan
- $\Sigma n =$  Jumlah Responden

Diabaikan



TABEL DISTRIBUSI NILAI CHI-KUADRAT

d.f	0.25	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
1	1.32330	2.70554	3.84146	6.6349	7.87944	10.82757
2	2.77259	4.60517	5.99146	9.21034	10.59663	13.81551
3	4.10834	6.25139	<b>7.81473</b>	11.34487	12.83816	16.26624
4	5.38527	7.77944	9.48773	13.2767	14.86026	18.46683
5	6.62568	9.23636	11.0705	15.08627	16.7496	20.51501
6	7.8408	10.64464	12.59159	16.81189	18.54758	22.45774
7	9.03715	12.01704	14.06714	18.47531	20.27774	24.32189
8	10.21885	13.36157	15.50731	20.09024	21.95495	26.12448
9	11.38875	14.68366	<b>16.91898</b>	21.66599	23.58935	27.87716
10	12.54886	15.98718	18.30704	23.20925	25.18818	29.5883
11	13.70069	17.27501	19.67514	24.72497	26.75685	31.26413
12	14.8454	18.54935	21.02607	26.21697	28.29952	32.90949
13	15.98391	19.81193	22.36203	27.68825	29.81947	34.52818
14	17.11693	21.06414	23.68479	29.14124	31.31935	36.12327
15	18.24509	22.30713	24.99579	30.57791	32.80132	37.6973
16	19.36886	23.54183	26.29623	31.99993	34.26719	39.25235
17	20.48868	24.76904	27.58711	33.40866	35.71847	40.79022
18	21.60489	25.98942	28.8693	34.80531	37.15645	42.3124
19	22.71781	27.20357	30.14353	36.19087	38.58226	43.8202
20	23.82769	28.41198	31.41043	37.56623	39.99685	45.31475
21	24.93478	29.61509	32.67057	38.93217	41.40106	46.79704
22	26.03927	30.81328	33.92444	40.28936	42.79565	48.26794
23	27.14134	32.0069	35.17246	41.6384	44.18128	49.72823
24	28.24115	33.19624	36.41503	42.97982	45.55851	51.1786
25	29.33885	34.38159	37.65248	44.3141	46.92789	52.61966
26	30.43457	35.56317	38.88514	45.64168	48.28988	54.05196
27	31.52841	36.74122	40.11327	46.96294	49.64492	55.47602
28	32.62049	37.91592	41.33714	48.27824	50.99338	56.89229
29	33.71091	39.08747	42.55697	49.58788	52.33562	58.30117
30	34.79974	40.25602	43.77297	50.89218	53.67196	59.70306
31	35.88708	41.42174	44.98534	52.19139	55.0027	61.09831
32	36.97298	42.58475	46.19426	53.48577	56.32811	62.48722
33	38.05753	43.74518	47.39988	54.77554	57.64845	63.8701
34	39.14078	44.90316	48.60237	56.06091	58.96393	65.24722
35	40.22279	46.05879	49.80185	57.34207	60.27477	66.61883